

**MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI
PENGADILAN AGAMA BIMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm)



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.) Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan
Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

YULIYANTI
NIM: 10100114100

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuliyanti
NIM : 10100114100
Tempat/Tgl. Lahir : Sonco Kab. Bima, 25 Juli 1996
Jur/Prodi/Konsentrasi : Peradilan/Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan/S1
Fakultas/program : Syari'ah Dan Hukum/S1
Alamat : Samata-Gowa
Judul : Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris di
Pengadilan Agama Bima Perspektif Hukum Islam (Studi
Putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.BM)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhannya, maka skripsi ini dan gelar diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 28 Maret 2018

Penyusun,

Yuliyanti

NIM: 10100114100

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA BIMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm)", yang disusun oleh Yuliyanti, NIM: 10100114100, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 M, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum, Jurusan Peradilan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 6 April 2018 M
20 Rajab 1439 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hamsir, M. Hum.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Abdillah Mustari, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Supardin, M.H.I.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Hamzah, M.H.I.	(.....)

Disahkan oleh:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP: 1962 1016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji hanya milik Allah Swt atas rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dicurahkan kepada peneliti dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Salam dan shalawat senantiasa peneliti haturkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu' Alaihi Wasallam sebagai petunjuk jalan kebenaran dalam menjalankan aktivitas keseharian kita.

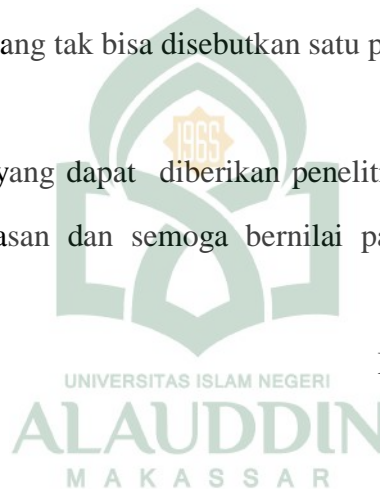
Dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Almarhum H.M.Nor Ibrahim dan Ibunda Hj. Hadijah serta seluruh keluarga yang telah memberikan perhatian dan pengorbanan serta keikhlasan doa demi kesuksesan peneliti. Selain itu tidak lupa peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H.Musafir Pababbari, M.Si., Rektor UIN Alauddin Makassar beserta wakil rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan para wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Dr. H. Supardin. M.H.I. dan Dr.Hj. Patimah, M.Ag., selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Peradilan yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan motivasi, serta tak lupa peneliti menghaturkan terima kasih kepada Ibu Sri Hajati, S.H.I. selaku Staf Jurusan Peradilan.
4. Bapak Dr. H. Supardin, M.H.I. dan Bapak Dr. Hamzah, M.H.I., selaku Pembimbing I dan II yang telah banyak mengarahkan dan membimbing peneliti dalam perampungan penulisan skripsi sampai tahap penyelesaian.

5. Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag., selaku Penguji I dan Dr. Abdillah Mustari M.Ag., selaku Penguji II yang telah banyak memberikan nasehat serta saran dalam perampungan skripsi.
6. Para Dosen, dan Karyawan dan Karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum yang secara konkrit memberikan bantuannya pelayanan dalam penyelesaian studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum.
7. Kepada Panitera Pengganti Ibu Shalehah S.H.I. dan Ibu Nana Parmini Armunto S.H. beserta Para Hakim dan staf Pengadilan Agama Bima yang telah banyak membantu dalam penelitian skripsi.
8. Dan yang terpenting skripsi ini peneliti persembahkan kepada kedua orang tua yang tercinta, Ayahanda Almarhum H.M.Nor Ibrahim dan Ibunda Hj. Hadijah sebagai ungkapan terima kasih tak terhingga karena telah membesarkan dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang. Serta memberikan semangat kepada peneliti dan juga memberikan do'a, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
9. Kakak (Sarafiah S.Pd., Arbiah, Wahyusin, Eni, Sa'ati, Hasnah, dan adik satu-satunya Arifudin) dan kakak Supriadin S. Hum. yang telah banyak membantu peneliti selama menempuh kuliah di Makassar dan membantu secara materil selama peneliti menyelesaikan kuliah.
10. Kepada Kakanda M. Ilham, S.H.I., M.H yang telah banyak berkontribusi dan memberikan dukungan dari peneliti masuk di kampus sampai menyelesaikan studi.
11. Terkhusus kepada Anita Andriani, Septi Ekawati Putri, Esa Masyitah Putri, dan Indriati Putri Ayu Ningsih teman yang paling dekat seperti saudara sendiri yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta teman-teman Pondok Aspuri Masyitah yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu.

12. Rekan-rekan seperjuangan terkhusus Peradilan-C 2014 yang telah menemani dan memberikan dukungan dari awal masuk kuliah sampai akhir.
13. Kepada pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Peradilan Periode 2016 dan 2017 dan Ikatan Penggiat Peradilan Semu (IPPS) Fakultas Syariah dan Hukum.
14. Terimakasih kepada teman-teman KKN Angkatan 57 Posko Desa Biroro Sinjai Timur yang telah memberikan semangat dalam proses penyelesaian akhir.
15. Dan kepada para senior, teman-teman dan adik-adik, dan terkhusus teman-teman dari Bima yang tak bisa disebutkan satu persatu namanya dalam skripsi ini.

Tiada balasan yang dapat diberikan peneliti, kecuali kepada Allah SWT peneliti harapkan balasan dan semoga bernilai pahala disisi-Nya. *Aamiin Ya Rabbal Alamin.*



Makassar, 15 Desember 2017

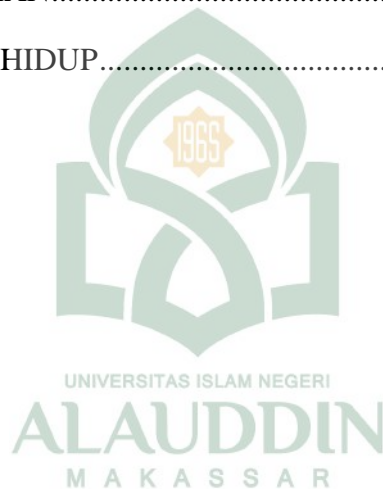
Peneliti

Yuliyanti

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRASNSLITERASI	ix
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1-9
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORETIS	10-34
A. Mediasi dalam Lembaga Peradilan	10
B. Mediasi dalam Pendekatan Maslahat	22
C. Hukum Kewarisan Islam	23
D. Kerangka Konseptual	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	35-39
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Sumber Data	36
D. Metode Pengumpulan Data	36
E. Instrumen Penelitian	37
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	38
G. Pengujian Keabsahan Data	39
BAB IV MEDIASI PERKARA KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA BIMA	40-77
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bima Kelas 1B	40
B. Proses Penyelesaian Sengketa Waris melalui Mediasi	

dalam Putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm	45
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mediasi Waris Putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm	66
D. Analisis terhadap Proses Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris pada Putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm	76
BAB V PENUTUP.....	78-79
A. Kesimpulan	78
B. Implikasi Penelitian.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80-83
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	85



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	a	tidak dilambangkan
ب	ba	b	bc
ت	ta	t	tc
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	k	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	s	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...ى	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	a	a dan garis di atas
ى	<i>Kasrah dan ya'</i>	i	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk tā' marbūtah ada dua, yaitu: tā' marbūtah yang hidup Ta'marbutah yang hidup (berharakat fathah, kasrah atau dammah) dilambangkan dengan huruf "t", ta'marbutah yang mati (tidak berharakat) dilambangkan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudal al-at fal*

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Tanda Syaddah atau tasydid dalam bahasa Arab, dalam transliterasinya dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا: *rabbana*

نَجَّيْنَا: *najjainah*

6. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf "I" (ل) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الْفَلْسَفَةُ: *al-falsafah*

الْبِلَادُ: *al-biladu*



7. Hamzah

Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu apabila hamzah terletak di tengah dan akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal

أُمِرْتُ : *umirtu*

2. Hamzah tengah

تَأْمُرُونَ : *ta' muruna*

3. Hamzah akhir

سَيِّءٌ : *syai'un*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

Fil Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. *Lafz al-Jalalah (الله)*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

الله *Dinullaha billah*

Adapun ta' marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم *Hum fi rahmatillah*

10. *Huruf Kapital*

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital dipakai. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal dari nama diri tersebut, bukan huruf awal dari kata sandang.

Contoh: *Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'an*

Wa ma Muhammadun illa rasul

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= <i>subhānahū wa ta'ālā</i>
Saw.	= <i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imrān/3:4
HR	= Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Yuliyanti
NIM : 10100114100
Judul : Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Bima Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm)

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Bima perspektif hukum Islam (Studi Putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm)? selanjutnya yang menjadi sub masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana proses penyelesaian sengketa waris melalui mediasi pada putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm?, 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik mediasi waris dalam putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm?

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *field research kualitatif deskriptif* dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif-yuridis. Adapun sumber data penelitian ini yaitu Putusan perkara No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm, Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan, Hakim Mediator, dan Panitera Muda Hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses mediasi dalam sengketa waris pada putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm secara garis besar telah sesuai dengan aturan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan telah mencapai perdamaian. Pelaksanaan mediasi tidak mencapai batas waktu 40 hari kerja sebagaimana diatur dalam PERMA, tapi hanya 5 (lima) hari kerja. Untuk mencapai perdamaian mediasi dilakukan sebanyak 2 kali, di mana pada mediasi pertama mediator melakukan kaukus, pertemuan dengan para penggugat/kuasa hukumnya terlebih dahulu dan pihak tergugat secara terpisah. Kemudian, pertemuan secara bersamaan antara kedua belah pihak dan mendengarkan kesimpulan masing-masing sehingga mencapai kesepakatan dan dibuat akta perdamaian. Proses mediasi dalam putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.BM ditinjau dari hukum Islam sesuai dengan konsep *Sulh* atau *Islah* dan konsep *Hakam*. Penyelesaian sengketa waris pada proses mediasinya dilakukan dengan *takharuj* berdasarkan kerelaan dan kesepakatan para pihak dan tidak mengacu pada ketentuan pembagian warisan 2:1 dalam hukum kewarisan Islam.

Implikasi dari Penelitian ini yaitu: 1). bagi para pihak yang bersengketa terutama mengenai sengketa kewarisan Islam, para pihak harus lebih memprioritaskan hubungan kekerabatan dari pada harta. 2). Apabila telah meninggal seseorang dan meninggalkan harta warisan dan ahli waris, hendaknya harta warisan itu segera dibagi sebelum keutuhan harta warisan terbagi-bagi, berpindah tangan dan dikuasai oleh orang lain. 3). Mediator yang menangani sengketa kewarisan harus memiliki *skill* dalam melakukan pendekatan terhadap para pihak, perlu adanya peningkatan jumlah mediator yang bersertifikat untuk lebih memudahkan penerapan mediasi di pengadilan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai khalifah di muka bumi dalam menjalankan tugasnya memiliki berbagai konflik yang harus dihadapi dan tak dapat dihindari. Konflik tidak hanya terjadi antar individu, keluarga, masyarakat, dan bahkan antar Negara. Perbedaan antara manusia pun berpotensi menjadi penyebab terjadinya konflik baik perbedaan fisik, keyakinan, pola pikir, maupun kepentingan. Faktor fundamental yang mendasari terjadinya konflik dan menimbulkan persengketaan di antara manusia adalah tidak terpenuhinya kepentingan sebagaimana yang diinginkan. Kepentingan tersebut dapat berupa kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Pada sisi lain, sikap ego (*amaniah*) juga turut mendorong manusia berkonflik dalam mewujudkan kepentingannya. Oleh karena itu manusia dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dapat menggunakan akal dengan panduan Al-qur'an. Dalam menyusun strategi dan prinsip resolusi konflik dan penyelesaian sengketa sebagaimana yang telah diwujudkan oleh Nabi Muhammad Saw dalam berbagai bentuk berupa fasilitasi, negosiasi, adjudikasi, rekonsiliasi, mediasi, arbitrase dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi).¹ Dalam negara hukum konflik masyarakat dapat berlanjut menjadi sengketa atau perkara di pengadilan.

Dalam hubungan sosial kemasyarakatan, sengketa pada umumnya menyangkut hak dan kewajiban yang digolongkan dalam permasalahan perdata yang berkaitan dengan hukum keluarga, seperti kasus perceraian yang digabung dengan kasus harta bersama, pemeliharaan anak, nafkah-nafkah serta sengketa

¹Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2009), h. 122.

kewarisan. Hal tersebut telah banyak menelan korban, baik berupa materi maupun nyawa. Mengapa konflik keluarga sangat penting untuk ditanggulangi, karena segala masalah dapat dikatakan berawal dari keluarga. Hal ini yang menjadi indikasi mengapa Al-qur'an banyak menampilkan hukum-hukum tentang keluarga bukan hukum tentang kenegaraan. Konflik dapat diselesaikan salah satunya dengan mediasi baik diluar pengadilan (non litigasi) maupun di pengadilan (litigasi). Implementasi mediasi dalam penyelesaian perkara perdata terutama bagi orang-orang yang beragama Islam dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Mediasi bisa dilakukan diawal litigasi maupun selama litigasi terhadap perkara perceraian, gugatan waris, gugatan harta bersama, gugatan nafkah, hadhonah dan sebagainya.

Dalam sengketa kewarisan, yang objeknya berupa harta benda yang dalam pembagiannya sering timbul ketidakpuasan diantara sebagian para ahli waris disamping ketidaktahuannya mengenai bagian-bagian yang diatur dalam Islam serta keserakahan dan rasa egois.² Penyelesaian dapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat secara kekeluargaan antara para ahli waris. Jika persengketaan meningkat maka diperlukan pihak ketiga yang memiliki otoritas dan wewenang untuk memberikan keadilan dan keputusan yang memiliki kekuatan hukum yaitu Pengadilan Agama. Lembaga peradilan ditempuh sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian sengketa kewarisan.

Sengketa kewarisan yang terjadi dimasyarakat pada umumnya bertumpu pada pembagian harta warisan karena ada ahli waris yang tidak mendapatkan haknya, atau ada sebagian ahli waris yang menguasai harta warisan tersebut. Sengketa juga terjadi apabila ahli waris menjual harta warisan tanpa persetujuan

²Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Cet. Ke-4; Jakarta: Kencana, 2004), h. 305.

ahli waris lainnya, perbedaan pendapat, adanya benturan kepentingan dan tindakan beberapa pihak yang mengulur pembagian warisan dengan motif tertentu.³ Perkara sengketa warisan diperiksa di pengadilan melalui ajudikasi. Sebelum itu majelis hakim harus menawarkan penyelesaian sengketa melalui perdamaian sesuai pasal 130 Herzenine Indonesisch Reglement (HIR) dan pasal 154 RBg. agar putusan tidak batal demi hukum.⁴ Penyelesaian sengketa melalui perdamaian di pengadilan dilakukan dengan mediasi dan bantu oleh seorang mediator baik dari kalangan hakim maupun mediator di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa dengan cara ditengahi oleh pihak ketiga dalam Islam disebut *tahkim*.

Kehadiran PERMA No. 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, ketertiban dan kelancaran dalam penyelesaian suatu sengketa perdata agar dapat menghasilkan perdamaian.⁵ Kemudian PERMA No. 1 Tahun 2016 diundangkan sebagai penyempurna PERMA sebelumnya agar pelaksanaan mediasi di pengadilan lebih optimal dan berdaya guna sehingga dapat meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan.⁶ Jika para pihak dapat mencapai kesepakatan perdamaian, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis, kemudian ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa dan ditandatangani oleh mediator lalu dikuatkan dengan akta perdamaian yang diterbitkan oleh pengadilan melalui sebuah putusan.

³Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h.119.

⁴Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008.

⁵Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h. 311.

⁶PERMA No. 1 Tahun 2016.

Perkara gugat waris yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Agama Bima melalui mediasi ditemui pada Putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm tahun 2015. Perkara tersebut diselesaikan melalui beberapa kali proses mediasi dan beberapa kali persidangan hingga para pihak dapat didamaikan.⁷ Dalam upaya mendamaikan para pihak yang bersengketa, mediasi dapat dilakukan diawal pemeriksaan perkara hinggapada proses persidangan. Kesepakatan yang telah dituangkan dalam akta perdamaian bertujuan untuk menghukum para pihak untuk dapat melaksanakan isi perdamaian yang telah mereka buat.

Sengketa perkara No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm adalah mengenai tuntutan pembagian harta yang ditinggalkan oleh pewaris sebelum meninggal dunia mengamanatkan/memberi kuasa pada penggugat untuk mengurus harta tersebut yang telah lama dikuasai oleh orang lain dan baru 28 Januari 2015 dieksekusi oleh pengadilan Negeri Raba Bima. Penggugat meragukan itikad baik tergugat mengalihkan tanah sengketa/tanah objek perkara. Perkara tersebut berhasil diselesaikan melalui mediasi karena para pihak menjalani proses mediasi dibarengi dengan itikad baik serta tekad untuk dapat menyelesaikan konflik tanpa harus mengorbankan hubungan kekeluargaan. Mediator dalam menyelesaikan suatu sengketa memiliki peran penting untuk menciptakan peluang damai dan menciptakan komunikasi yang efektif agar memperoleh hasil yang saling menguntungkan. Dalam penyelesaian sengketa waris Islam, mediator dapat berpegang pada ketentuan yang telah dijelaskan dalam Al-qur'an dan hadis serta peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan di atas terkait dengan sengketa kewarisan yang dapat diselesaikan melalui mediasi, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian dan menyusunnya ke dalam sebuah skripsi dengan judul **“Mediasi**

⁷Shalehah, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Bima. *Wawancara melalui Handphone* (08 April 2017).

dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Bima Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm)”.

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan proses penyelesaian sengketa waris melalui mediasi untuk memperoleh perdamaian serta tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan mediasi tersebut.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu:

- a. Mediasi
- b. Sengketa kewarisan di pengadilan Agama Bima
- c. Hukum Islam

2. Deskripsi Fokus

Untuk lebih terarahnya penelitian ini dan untuk tidak menimbulkan kekeliruan dalam menginterpretasikannya, maka yang menjadi deskripsi fokus dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pengertian mediasi menurut Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 berbunyi “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan parapihak dengan dibantu oleh mediator”.
- b. Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan.

- c. Kewarisan adalah peralihan harta benda atau harta kekayaan berupa tirkah dari pewaris kepada ahli waris dengan mengikuti aturan hukum yang berlaku.
- d. Pengadilan Agama Bima adalah Pengadilan yang mengadili sengketa-sengketa perdata orang-orang beragama Islam yang berdomisili di kota Bima dan kabupaten Bima.
- e. Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan hadis; hukum syarak

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang menjadi pokok masalah yaitu “Bagaimana proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di pengadilan agama Bima perspektif hukum Islam (Studi Putusan No.0476/Pdt.G/2015/PA.Bm). peneliti merumuskan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa waris melalui mediasi pada putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses mediasi dalam putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm?

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, masalah mediasi sesungguhnya telah banyak di tulis secara teoritis di dalam literatur. Setelah menelusuri berbagai referensi yang berkaitan tentang pembahasan ini,peneliti menemukan beberapa buku, jurnal, dan skripsi yaitu:

1. Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, tahun 2009. Buku ini memusatkan pembahasannya pada lembaga mediasi sebagai alternatif penyelesaian

sengketa yang memberikan solusi win-win bagi para pihak yang bertikai. Dalam buku ini dipaparkan secara komprehensif apa yang dimaksud dengan mediasi, keterampilan apa yang harus dimiliki mediator, dipaparkan pula batasan dan pelaksanaan mediasi dalam perspektif hukum syari'ah, hukum adat, dan hukum nasional. Perbedaannya, dalam penelitian yang dilakukan peneliti berusaha menjelaskan proses tercapainya perdamaian antara para pihak yang bersengketa dalam mediasi selama pemeriksaan perkara No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis.

2. Jurnal al-ahkam STAIN Palopo, dengan judul "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Melalui Proses Mediasi", tahun 2014. Dalam jurnal ini memaparkan tentang pengertian, ruang lingkup, tujuan, prinsip-prinsip dan model mediasi di pengadilan. Selain itu menjelaskan juga tentang tinjauan yuridis tentang mediasi sebagai penyelesaian sengketa, tahap dan proses mediasi di pengadilan, serta kewenangan pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa. Perbedaannya, peneliti membahas secara spesifikasi penyelesaian sengketa waris melalui mediasi di pengadilan Agama Bima dengan mengangkat kasus pada putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm.
3. H. Abd. Halim Talli, Laporan Penelitian dengan judul "Efektivitas Mediasi Pada Pengadilan Agama di Sulawesi Selatan", tahun 2014. Dalam laporan penelitian ini menjelaskan tentang pengertian, unsur-unsur, jenis-jenis mediasi, dan pengaturan mediasi dalam hukum acara perdata. Laporan penelitian ini juga menjelaskan penerapan mediasi di pengadilan agama, proses mediasi dalam penyelesaian perkara di PA Makassar, dan hambatan penerapan mediasi dalam proses penyelesaian perkara di

Pengadilan Agama Makassar. Laporan penelitian ini memiliki keterkaitan pada tema yang diangkat tentang mediasi, tapi bedanya laporan ini membahas efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Makassar sedangkan pen mengangkat bagaimana proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Bima.

4. Bima Cahya Setiawan, skripsi dengan judul “Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam”, tahun 2014. Skripsi ini menjelaskan tentang asas, teori, konsep, dan pengertian dari penyelesaian sengketa, mediasi dan kewarisan Islam. Skripsi ini juga memaparkan beberapa keuntungan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa. Skripsi ini memfokuskan penelitian pada kajian mengenai kaidah-kaidah dalam hukum positif dengan pendekatan yuridis-normatif. Keuntungan mediasi di antaranya perkara dapat diselesaikan dengan cepat, efektif dan murah. Selain itu juga, salah satu pihak tidak merasa tertekan karena hasil mediasi merupakan kesepakatan para pihak yang bersengketa, perkara dapat diselesaikan tanpa ada permusuhan di antara pihak yang menjadi ahli waris. Yang menjadi perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu pada studi putusan perkara No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm. Peneliti berusaha menjelaskan bagaimana proses mediasi sehingga mampu mencapai kesepakatan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa.
5. Rasma Samma, skripsi dengan judul “Efektivitas Mediasi Terhadap Sengketa Perceraian Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa”, tahun 2013. Dalam skripsi ini membahas bagaimana upaya perdamaian yang ditempuh oleh mediator, faktor penghambat pelaksanaan mediasi terhadap perkara perceraian. Dipaparkan juga efektivitas

pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di PA Sungguminasa belum optimal, hal itu dibuktikan dengan indikator jumlah penerimaan perkara 3 tahun terakhir. Hanya ada 8 perkara yang berhasil dimediasi dari 1791 jumlah perkara perceraian yang masuk di pengadilan agama sungguminasa. Yang menjadi perbedaannya adalah terletak pada objek penelitian, peneliti mengambil objek sengketa waris sedangkan skripsi ini perkara perceraian.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan proses penyelesaian sengketa waris melalui mediasi pada putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap proses mediasi dalam putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoretis, Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian/pemikiran lebih lanjut dan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam khususnya mediasi waris.
2. Kegunaan praktis dari penelitian ini agar dapat menjadi acuan dan pertimbangan mediator yang akan datang dan pihak yang bersengketa, khususnya dalam penyelesaian sengketa waris di pengadilan agama.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Mediasi dalam Lembaga Peradilan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Mediasi

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa baik antara individu maupun antara kelompok.

Mediasi menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata mediasi berarti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.⁸ Dari pengertian mediasi ini, mengandung tiga unsur penting. *Pertama*, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki wewenang apa-apa dalam pengambilan keputusan.

Penjelasan berikut akan dikemukakan makna mediasi secara etimologi dan terminologi yang diberikan oleh para ahli. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. 'Berada ditengah' juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga

⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), h. 569.

kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari pada pihak yang bersengketa.⁹

Menurut Wirhanuddin, mediasi yaitu penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan.¹⁰

Para ahli resolusi konflik beragam memberikan makna kata mediasi sesuai dengan sudut pandang masing-masing diantaranya, Laurence Bolle menyatakan, “Mediation is a decision making process in wich the parties are assited by a mediator attempt to improve the process of decision making and to assist the parties the reach an outcome to wich of than canassent”.¹¹

Artinya:

“Mediasi adalah proses pengambilan keputusan di mana partie dibantu oleh mediator; upaya mediator untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan dan untuk membantu partie mencapai hasil yang kemudian dapat dari persetujuan.”¹²

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, memberikan definisi bahwa;

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (pasal 1 ayat 7). Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa

⁹Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, h. 2.

¹⁰Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*(Cet. I; Semarang: Fatawa Publishing, 2014), h. 28.

¹¹Laurenc Bolle, *Mediation Principle, Process, and Partice* (New York: , 1996), h. 1. dikutip dalam Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, h. 26.

¹²Translate. *Google, com*.

menggunakan cara memutus atau melaksanakan sebuah penyelesaian (pasal 1 ayat 6).

Menurut Hukum Islam, secara etimologi perdamaian disebut dengan istilah Islah (as-sulh) yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan antara dua pihak, adapun menurut Syara' adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antar dua belah pihak yang saling bersengketa.¹³

Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian suatu sengketa, antara lain biaya lebih murah dari penyelesaian dengan cara yang lain, penyelesaian perkara lebih cepat, hasil yang dicapai dalam mediasi lebih memuaskan semua pihak, praktik dan belajar prosedur-prosedur penyelesaian masalah secara kreatif, keputusan-keputusan yang diambil bisa dilaksanakan.¹⁴

Dasar hukum perdamaian atau mediasi dalam Hukum Islam adalah sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Hujurat/49:10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat Rahmat”.¹⁵

Asbabunnuzul yang dikhususkan pada surat Al-Hujurat ayat 10 tidak ada, namun yang pasti ayat ini masih merespon ayat sebelumnya yaitu ayat ke 9

¹³Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer (Arab Indonesia)* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), h. 1188.

¹⁴Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Cet. 5; Jakarta: Kencana, 2008), h. 176.

¹⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya* (Solo: Abyan, 2014), h. 516.

yang mempunyai asbabunnuzul yang diriwayatkan oleh asy Syaikhani telah mengetengahkan sebuah hadis yang bersumberkan dari Anas r.a. bahwasanya Nabi saw. Pada suatu hari mengendarai keledai kendaraannya dengan tujuan menemui Abdullah ibnu Ubay. Abdullah ibnu Ubay berkata: “menjauhlah dariku, karena sesungguhnya bau keledaimu menyesakkan hidungku. “Berkata salah seorang dari kalangan sahabat Anshar dengan menjawabnya: “Demi Allah, bau keledainya sungguh lebih enak dari pada bau tubuhmu”. Salah seorang dari kalangan kaumnya Abdullah menjadi marah mendengar perkataan itu, dan akhirnya teman-teman dari kedua orang itu saling bersitegang. Pecahlah perkelahian seru di antara kedua belah pihak mereka saling baku hantam dengan pukulan dan terompah,¹⁶ Lalu turunlah surah Al-Hujarat ayat ke-9.

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۚ

Terjemahnya:

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”.¹⁷

¹⁶Al-Mahalliy, Imam Jalaludin, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat Surat Az Zumar s.d. Surat an Nas* (Bandung: Sinar Baru, 1990), h. 2246.

¹⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 516.

Menurut Imam Jalaludin dalam tafsir Jalalain bahwa, (Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah saudara) lebih menekankan pada makna saudara dalam seagama, (karena itu damaikanlah kedua saudara kalian) apabila mereka berdua bersengketa. Menurut qiraat yang lain dibaca ikhwatikum, artinya saudara-saudara kalian (dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat).¹⁸ Setelah ayat sebelumnya memerintahkan untuk melakukan perdamaian antara dua kelompok orang beriman. Ayat ini menjelaskan mengapa harus mendamaikannya? Karena sesungguhnya orang-orang mukmin yang mantap imannya serta dihimpun oleh keimanan, kendati tidak seketurunan adalah bagaikan bersaudara seketurunan, dengan demikian mereka memiliki keterikatan bersama dalam iman dan juga keterikatan bagaikan seketurunan. Karena itu wahai orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam pertikaian antar kelompok-kelompok damaikan walau pertikaian itu hanya terjadi antara kedua saudara kamu, apalagi jumlahnya yang bertikai lebih dari dua orang dan jagalah diri agar tidak ditimpa bencana baik akibat dari pertikaian itu maupun selainnya, supaya kamu mendapat rahmat antarlain rahmat persatuan kesatuan.¹⁹

Dasar hukum yang mengatur pengintegrasian mediasi ke dalam sistem peradilan pada dasarnya bertitik tolak pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg.
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Mediasi (Eks pasal130 HIR/154 RBg)

¹⁸Al-Mahalliy, Imam Jalaludin, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat Surat Az Zumar s.d. Surat an Nas*, h. 2235.

¹⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan KeserasianAl-qur'an)* (Vol. 13; Jakarta: Lentera Hati, 2012), h.248.

- c. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- d. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- e. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2. Prinsip Mediasi

Prinsip dasar adalah landasan filosofis dari terselenggaranya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi.²⁰

David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi yaitu prinsip kerahasiaan (*Confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*), prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).²¹

Prinsip pertama mediasi adalah kerahasiaan atau *confidentiality*. Kerahasiaan yang dimaksudkan di sini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga mediator harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut.

²⁰John Michael Hoynes, Cretchen L. Haynes dan Larry Sun Fang, *Mediation: Positive Conflict Management*, (New York: SUNY Press, 2004), h. 16. dikutip dalam Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h. 28.

²¹Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h. 28-30.

Prinsip kedua, sukarela atau *volunteer*. Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan atau kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain.

Prinsip ketiga, pemberdayaan atau *empowerment*. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus diakui dan dihargai, dan oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar.

Prinsip keempat, netralitas atau *neutrality*. Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi.

Prinsip kelima, solusi yang unik atau *a unique solution*. Bahwasannya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.²²

3. Peran dan Fungsi Mediator

Mediator memiliki peranan yang penting dalam menentukan suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara pihak. Desain pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan,

²²Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, h. 37-38.

menjaga keseimbangan proses mediasi dan menurut para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimainkan oleh mediator.

Kovach menyebutkan peran mediator mencakup hal-hal berikut:

- a. Mengarahkan komunikasi di antara para pihak.
- b. Memfasilitasi atau memimpin proses perundingan.
- c. Mengevaluasi kemajuan proses perundingan.
- d. Membantu para pihak untuk mempelajari dan memahami pokok masalah dan berlangsungnya proses perundingan secara baik.
- e. Mengajukan usul atau gagasan tentang proses dan penyelesaian sengketa.
- f. Mendorong para pihak ke arah penyelesaian.
- g. Mendorong kemampuan diri dan pemberdayaan para pihak untuk melaksanakan proses perundingan.
- h. Mengendalikan jalannya proses perundingan.²³

Menurut Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook bahwa fungsi mediator yaitu:²⁴

- a. Sebagai “katalisator”, mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi.
- b. Sebagai “pendidik”, berarti seseorang harus berusaha memahami aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis dan kendala usaha dari para pihak.

²³Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 63-64.

²⁴Rahmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, h. 186-187. dikutip dalam Widia Asti “Implementasi PERMA No.1 Tahun 2008 Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Makassar)” *Skripsi* (Makassar: Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin, 2015), h. 23.

- c. Sebagai “penerjemah”, berarti mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang baik.
- d. Sebagai “narasumber”, berarti seorang mediator harus mendayagunakan sumber-sumber informasi yang tersedia.
- e. Sebagai “penyanggah berita jelek”, berarti seorang mediator harus berusaha menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional.
- f. Sebagai “agen realitas”, berarti mediator harus berusaha memberi pengertian secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak mungkin/tidak masuk akal akan tercapai melalui perundingan.
- g. Sebagai “kambing hitam”, berarti seorang mediator harus siap disalahkan, misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan.

4. Prosedur Mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016

Perubahan Ketentuan Prosedur Mediasi dalam Perma Nomor 1 tahun 2016, yaitu sebagai berikut:²⁵

a. Waktu Pelaksanaan Mediasi

Dalam Perma No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diatur tentang;

- 1) lama 30 hari.
- 2) Permohonan perpanjangan waktu mediasi dilakukan oleh mediator disertai alasan.

²⁵Doni Dermawan, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”, <http://www.pta-jambi.go.id/11-artikel/3870-implementasi-peraturan-mahkamah-agung-ri-nomor-1-tahun-2016-tentang-prosedur-mediasi-di-pengadilan> (15 April 2017).

3) waktu mediasi dengan ketentuan sebagai berikut:

Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Pengaturan waktu mediasi ini lebih singkat dengan ketentuan yang terdapat dalam Perma No 1 tahun 2008 yang mengatur jadwal mediasi selama 40 hari. Namun perpanjangan waktu untuk mediasi atas kesepakatan para pihak lebih lama lagi yaitu 30 hari sedangkan dalam Perma No 1 tahun 2008 hanya 14 hari.

b. I'tikad Baik dalam Melaksanakan Mediasi

Perma No. 1 tahun 2016 pasal 7 mengatur tentang kewajiban melaksanakan mediasi dengan i'tikad yang baik. Para pihak yang terlibat dalam proses mediasi harus mempunyai i'tikad yang baik sehingga dengan i'tikad yang baik tersebut proses mediasi dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Indikator yang menyatakan para pihak tidak beri'tikad baik dalam melaksanakan mediasi, yaitu:

- 1) Tidak hadir dalam proses mediasi meskipun sudah dipanggil dua kali berturut-turut.
- 2) Hadir dalam pertemuan mediasi pertama, tetapi selanjutnya tidak hadir meskipun sudah dipanggil dua kali berturut-turut.
- 3) Tidak hadir berulang-ulang sehingga mengganggu jadwal mediasi.
- 4) Tidak mengajukan atau tidak menanggapi resume perkara.
- 5) Tidak menandatangani kesepakatan perdamaian.

Pelaksanaan mediasi dengan adanya para pihak yang tidak beriktikad baik, mempunyai dampak hukum terhadap proses pemeriksaan perkara. Dalam hal ini dapat dilihat dari aspek para pihak yang tidak beriktikad baik, yaitu:

- 1) Akibat hukum Penggugat yang tidak beri'tikad baik

- (a) Penggugat yang tidak beri'tikad baik gugatannya dinyatakan tidak diterima (NO).
 - (b) Penggugat juga dikenai kewajiban membayar biaya mediasi.
 - (c) Mediator menyatakan penggugat tidak beri'tikad baik dalam laporan mediasi disertai rekomendasi sanksi dan besarnya.
 - (d) Hakim Pemeriksa Perkara berdasarkan laporan mediator menggelar persidangan dan mengeluarkan putusan.
 - (e) Biaya mediasi sebagai sanksi diambil dari panjar biaya atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat.
- 2) Akibat Hukum Tergugat yang Tidak Beri'tikad Baik
- (a) Tergugat yang tidak beri'tikad baik dikenakan pembayaran biaya mediasi.
 - (b) Mediator menyatakan tergugat tidak beri'tikad baik dalam laporan mediasi disertai rekomendasi sanksi dan besarnya.
 - (c) Hakim Pemeriksa Perkara berdasarkan laporan mediator sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara mengeluarkan penetapan tentang tidak beri'tikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar.
 - (d) Pembayaran biaya mediasi oleh tergugat mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - (e) Pembayaran dari tergugat diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan.

5. Akta Perdamaian

Pada permulaan sidang sebelum dimulai pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa. Apabila upaya perdamaian itu berhasil, maka dibuatlah akta perdamaian yang

isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat antara mereka, dengan demikian perdamaian dapat mengakhiri perkara antara pihak-pihak dan berlaku sebagai putusan hukum yang telah mempunyai hukum tetap.

Esensi akta perdamaian menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.

Kekuatan hukum akta perdamaian diatur dalam pasal 1858 KUH Perdata dan pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR.

a. Disamakan Kekuatannya dengan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap.

Menurut pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata, perdamaian di antara pihak di mana kekuatannya seperti putusan hakim yang penghabisan. Hal ini pun ditegaskan pada kalimat terakhir pasal 130 ayat (2) HIR, bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

b. Mempunyai Kekuatan Eksekutorial

Penegasan ini disebut dalam pasal 130 ayat (2) HIR, kalimat terakhir tersebut menegaskan, putusan akta perdamaian berkekuatan eksekutorial (*executorial kracht*) sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

c. Putusan Akta Perdamaian Tidak Dapat Dibanding

Hal itu ditegaskan dalam pasal 130 ayat (3) HIR. Putusan akta perdamaian tidak dapat dibanding. Dengan kata lain, terhadap putusan tersebut tertutup untuk upaya hukum (banding dan kasasi). Larangan itu sejalan dengan ketentuan yang mempersamakan kekuatannya sebagai putusan yang telah

berkekuatan hukum tetap, telah berakhir upaya hukum. Dalam Putusan MA No. 975 K/Sip1973 yang mengatakan bahwa berdasarkan pasal 154 RBg/130 HIR, putusan perdamaian atau *acte van vergelijk* merupakan suatu putusan yang tertinggi, tidak ada upaya banding dan kasasi terhadapnya.²⁶

B. Mediasi dalam Pendekatan Masalah

Sebagaimana Islam menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara', Pengadilan Agama melakukan berbagai terobosan hukum yang penuh dengan kemaslahatan seperti halnya diadakannya sidang mediasi, dimana dalam pelaksanaan mediasi tujuan syara' seperti menjaga agama, keturunan dan juga menjaga harta, begitu juga tujuan-tujuan syara' yang terkandung dalam mediasi. Penggunaan mediasi sebagai media penyelesaian sengketa telah dikenal sejak lama. Mediasi telah lama dikenal dalam hukum adat kita. Pola-pola penyelesaian sengketa melalui Hakim perdamaian pada prinsipnya adalah sama dengan pola penyelesaian sengketa melalui mediasi. Demikian pula budaya hukum pada pemeluk agama Islam yang memiliki budaya Islah dan Hakam dalam penyelesaian sengketa.

Mediasi dapat memberikan sejumlah kemaslahatan atau manfaat antara lain:

1. Mediasi diharapkan menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologi mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.

²⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 279-281.

3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsesus.
5. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskan.
6. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.²⁷

C. Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam

Secara bahasa, kata waratsa asal kata kewarisan digunakan dalam al-Qur'an. Dalam al-Qur'an dan dirinci dalam sunnah Rasulullah Saw., Hukum kewarisan Islam ditetapkan. Secara bahasa, kata waratsa memiliki beberapa arti; mengganti, memberi, dan mewarisi.²⁸

Secara terminologi, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.²⁹

²⁷Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h. 24-26.

²⁸Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Cet. 2; Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 1.

²⁹Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, h. 1.

Mawaris atau warisan dinamakan juga dengan Al-Faraidh, artinya bagian-bagian harta mayit yang ditetapkan oleh Allah bagi mereka yang berhak menerimanya.³⁰

Menurut Subekti, Hukum waris adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.³¹

Kewarisan merupakan peralihan harta benda atau harta kekayaan berupa *tirkah*³² dari pewaris kepada ahli waris dengan mengikuti aturan hukum yang berlaku.³³

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf a menyebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.³⁴

Berdasarkan uraian penjelasan mengenai pengertian yang dikemukakan di atas hampir memiliki kesamaan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum kewarisan adalah hukum tentang berpindahnya hak pemilikan harta *tirkah* pewaris, menentukan siapa saja yang dapat jadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing.

Dasar hukum kewarisan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yaitu:

³⁰Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Lin Nisaa'* (Cet. I; Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016), h. 885.

³¹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermassa, 1992), h. 95.

³²Tirkah adalah harta bersih yang akan dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Bersih yang dimaksud adalah bersih dari wasiat dan utang si pewaris.

³³Supardin, *Fikih Peradilan Agama di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu)* (Cet. I; Gowa: Alauddin University Press, 2014), h. 132.

³⁴Republik Indonesia, "Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam" dalam Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 608.

- a) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49.
- b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 171-214.

Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan pembagian harta warisan dalam hukum Islam berpedoman pada ayat-ayat al-Qur'an sebagai berikut:

- a) Q.S. al-Nisa/4:7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.³⁵

- b) Q.S. al-Nisa/4:11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ

³⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 78.

بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”³⁶

Ayat di atas merupakan ketentuan mengenai bagian ahli waris di mana anak laki-laki mendapat dua bagian anak perempuan atau 2:1, jika ahli waris terdiri dari beberapa anak perempuan maka bagiannya $\frac{2}{3}$ tapi jika hanya seorang saja $\frac{1}{2}$. Bagi ayah/ibu masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$ jika ada anak, jika tidak ada anak ibu mendapat $\frac{1}{3}$. Jika tidak ada anak tapi ada saudara maka ibu mendapat $\frac{1}{6}$.

c) Q.S. al-Nisa/4:12.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِن كَانَ
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا

³⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 78.

أَوْ دَيْنٍ^ج وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ^ج فَإِنْ
كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ^ج مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ^ق وَإِنْ كَانَتْ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ
أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ^ج فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ
ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ^ج مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ
مُضَارٍ^ج وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ^ق وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun".³⁷

³⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 79.

Ayat di atas merinci bagian suami jika tidak ada anak, maka mendapat $\frac{1}{2}$ tetapi jika ada anak mendapat $\frac{1}{4}$. Bagian istri jika tidak ada anak mendapat $\frac{1}{4}$ tetapi jika ada anak mendapat $\frac{1}{8}$. Ayat di atas juga menentukan pembagian harta jika pewaris mati kalalah dan bagian yang didapat oleh seorang saudara dan seorang saudari masing-masing $\frac{1}{6}$. Jika saudara lebih dari seorang maka mereka berserikat mendapat $\frac{1}{3}$. Para ulama sepakat bahwa saudara yang dimaksud pada ayat di atas adalah saudara seibu.

d) Q.S. al-Nisa/4:176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلَثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.³⁸

Ayat di atas menjelaskan kewarisan atas pewaris yang mati kalalah dan bagian seorang saudari adalah $\frac{1}{2}$. Jika yang mati kalalah adalah seorang saudari

³⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 106.

perempuan dan dia memiliki saudara laki-laki atau lebih, maka dia mewarisi seluruh hartanya. Jika pewaris mati kalalah dan memiliki dua orang saudara perempuan, maka mereka mendapat $\frac{2}{3}$. Tetapi jika pewaris itu memiliki saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka seorang laki-laki mendapat bagian lebih besar dari bagian seorang perempuan. Para ulama sepakat bahwa saudara yang dimaksud dalam ayat di atas adalah saudara sekandung atau seayah.

2. Asas-asas Kewarisan Islam

Setiap sistem kewarisan akan memiliki asas yang menjadi pedoman awal dari sistem kewarisan yang bersangkutan. Adapun yang menjadi asas dalam sistem kewarisan Islam yaitu:³⁹

a. Asas Berlaku dengan Sendirinya (Ijbari)

Pemindahan harta orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya. Pemindahan ini semata-mata karena akibat kematian orang yang punya harta. Asas ijbari hukum kewarisan dapat dilihat dari beberapa segi lain, yaitu:

- 1) Segi peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia.
- 2) Segi jumlah harta yang sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris, dan
- 3) Segi mereka yang akan menerima peralihan harta peninggalan itu, yang sudah ditentukan dengan pasti, yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan pewaris.

b. Asas Bilateral-Individual

³⁹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Gadzhah Mada University Press, 2012), h. 20-23.

Yang dimaksud dengan asas ini yaitu asas di mana tiap ahli waris baik laki-laki maupun perempuan dapat menerima hak kewarisan dari pihak kerabat ayah maupun ibu, sedangkan bagiannya dimiliki secara sendiri-sendiri oleh ahli waris tersebut sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan.

c. Asas Penyebarluasan dengan Prioritas di Lingkup Keluarga

Suatu asas yang menegaskan bahwa pembagian harta warisan berkemungkinan mencakup banyak ahli waris, bukan hanya anak saja yang dapat ahli waris tetapi lebih luas lagi pada suami atau isteri, orang tua, saudara-saudara bahkan cucu ke bawah. Walaupun cakupan pembagian warisan meluas tapi tetap dalam lingkungan keluarga, tetap diadakan keutamaan baik untuk mendapat warisan maupun dari segi bagian-bagiannya.

d. Asas Persamaan Hak dan Perbedaan Bagian

Hukum warisan Islam tidak membedakan hak untuk mendapatkan warisan antara laki-laki dan perempuan, antara anak-anak masih kecil dan mereka yang sudah dewasa. Semuanya sama-sama memiliki hak untuk mendapat warisan. Perbedaannya hanya terletak pada bagian yang akan didapat ahli waris. Hal ini disesuaikan dengan perbedaan proporsi beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga.

e. Asas Keadilan Berimbang

Asas ini berarti bahwa dalam ketentuan hukum waris Islam senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

3. Hubungan Kewarisan

Harta peninggalan orang yang meninggal dunia tidak serta merta dapat dibagi oleh orang yang hidup, kecuali ada hubungan yang menyebabkan terjadinya kewarisan. Adapun sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan yaitu:⁴⁰

a. Hubungan Keluarga (Nasab)

Hubungan kekeluargaan dibagi dua, yaitu kekeluargaan yang sebenarnya (*haqiqi*) dan hubungan kekeluargaan yang bersifat hukmi (yang kekeluargaan yang disebabkan oleh pembebasan budak). Hubungan keluarga atau nasab *haqiqi* ini dapat berupa hubungan orang tua dengan anak, saudara, paman, bibi dan lainnya, di mana hubungan itu dapat dihubungkan kepada orang tua.

b. Hubungan Perkawinan

Seorang mendapatkan harta warisan dari orang yang meninggal dunia, karena adanya hubungan pernikahan atau perkawinan, seperti antara suami dengan isteri atau sebaliknya.

c. Hubungan Agama (Sesama Muslim)

Dalilnya hadis Nabi Muhammad Saw.: “Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang Islam” (HR. Jama’ah). Bila seorang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, maka harta peninggalanya diserahkan kepada baitul mal untuk umat Islam, sebagai warisan.

d. Hubungan Wala’ (Sebab Memerdekakan budak)

Yaitu majikan mewarisi kepada budaknya yang telah ia merdekakan, tidak sebaliknya. Hubungan ini sudah tidak berlaku lagi, karena setelah Islam datang, perbudakan bertentangan dengan syariat Islam.

⁴⁰Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, h. 27-28.

4. Unsur-unsur Kewarisan

Berdasarkan uraian dari berbagai macam pengertian yang dikemukakan di atas, maka ada 3 hal yang menjadi unsur dalam kewarisan, yaitu:⁴¹

a. Ada Pewaris

Orang yang meninggalkan harta warisan disebut Pewaris. Pewaris yaitu orang yang sudah dalam keadaan meninggal dunia atau mati. Dalam hukum waris Islam, Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Oleh karena itu, seseorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan itu dilakukan pada saat menjelang kematiannya. Menurut sistem hukum waris Islam, pewaris adalah orang yang memiliki harta semasa hidupnya, telah meninggal dunia, dan beragama Islam. Baik yang mewariskan maupun yang diwarisi harus beragama Islam.

b. Ada harta warisan

Harta warisan yang dapat dibagi kepada ahli warisnya yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih, artinya harta benda serta segala hak setelah dikurangi dengan pembayaran utang-utang, pengurusan perlengkapan jenazah dan lain-lain yang diakibatkan dari meninggalnya si pewaris. Harta warisan berbeda dengan harta peninggalan. Tidak semua harta peninggalan menjadi harta yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Karena harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang wafat secara mutlak.

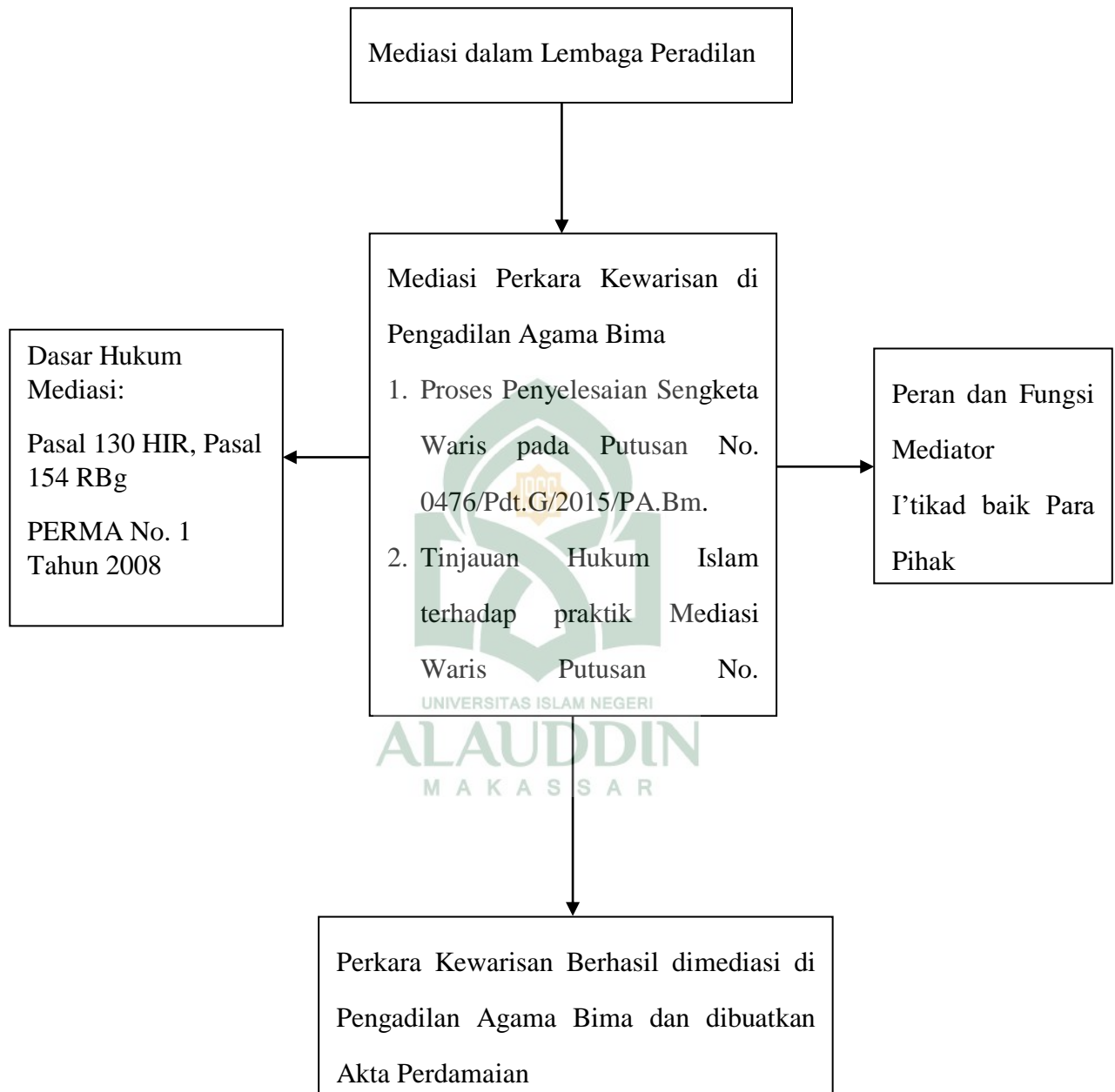
c. Ada Ahli Waris

⁴¹Abdillah Mustari, *Hukum Waris (Perbandingan hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata Barat)* (Cet. I; Gowa: Alauddin University Press, 2014), h. 39.

Adalah orang yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris, baik karena penunjukan undang-undang (*Ab-Intestato*) maupun karena pewasiatan (*testamenter*). Ahli waris dalam hukum Islam yaitu seseorang atau sekelompok orang yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (*nasab*) atau ikatan pernikahan, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.



D. Kerangka Konseptual



BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *field research kualitatif deskriptif* dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan bersumber dari hasil wawancara pihak-pihak yang terkait dalam proses mediasi yang diteliti dalam putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Bima Kelas 1B karena pengadilan tersebut mempunyai wewenang menangani perkara kewarisan yang terlebih dahulu harus melewati tahap mediasi. Dan putusan perkara yang diteliti, satu-satunya perkara yang berhasil dimediasi dari tahun 2015-2017. Selain itu, Pengadilan Agama Bima Kelas 1B memudahkan peneliti dalam meneliti serta memperoleh data dan informasi demi terpenuhinya tujuan penelitian peneliti.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Normatif* dan *Yuridis*. Pendekatan Normatif yaitu pendekatan masalah yang berpedoman pada aturan-aturan dalam hukum Islam baik berupa Al-qur'an, hadis, maupun pemikiran para tokoh yang berkaitan dengan mediasi dalam penyelesaian sengketa waris perspektif hukum Islam yang mengangkat kasus dari putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm. *Pendekatan Yuridis* berupa perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

C. Sumber Data

1. Data Primer⁴²

Sumber data primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian,⁴³ di antaranya adalah sumber rujukan tertulis berupa putusan perkara waris No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm, dan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2. Data Sekunder⁴⁴

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Data Tersier

Yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, misalnya kamus-kamus dan ensiklopedia.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara yakni:

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti mengenai lokasi penelitian di Pengadilan Agama Bima Kelas I B, Dalam hal ini pengamatan langsung, baik berupa rekaman, gambar, dan putusan.

⁴²Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30.

⁴³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. 7; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 105.

⁴⁴Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen yang resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya, h. 30.

2. Interview

Interview yang sering disebut juga dengan wawancara atau kuesioer lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari narasumber. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan para pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Kelas I B Bima guna memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan mediasi sengketa kewarisan.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental. Dokumen yang berbentuk tulisan seperti Akte, peraturan, kebijakan, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk gambar seperti foto, video dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dengan dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Adapun dokumen yang akan diteliti adalah dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kewarisan, seperti akta perdamaian, putusan pengadilan, laporan perkara yang masuk dan diputus tahunan, dan lain sebagainya.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “diuji validasi”. Uji validasi merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mencapai tujuan pengukurannya, yaitu mengukur apa yang ingin diukurnya dan mampu mengungkap mengapa yang ingin diungkapkan.

Peneliti kualitatif sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.⁴⁵

Penelitian dilakukan bertujuan untuk memperoleh data yang akurat tentang bagaimana proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris perspektif hukum Islam (Studi Putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.BM). Adapun instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah Pedoman Wawancara yaitu Salah satu instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa daftar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk memperoleh data atau informasi. Informasi dapat diperoleh dengan wawancara langsung dan wawancara tertulis dengan para hakim, mediator dan panitera Pengadilan Agama Bima Kelas 1B. Selain dari pada itu peneliti juga memerlukan kamera, alat perekam suara (handphone), serta alat tulis menulis seperti pulpen dan buku dalam melaksanakan penelitian ini.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Penarikan kesimpulan menggunakan alur pemikiran induktif dari data-data yang bersifat khusus menjadi data yang bersifat umum. Data yang diperoleh dari PA Bima dan bahan-bahan yang dibutuhkan tentang prosedur mediasi waris dideskripsikan, dianalisis, dan disimpulkan secara induktif untuk menjawab permasalahan penelitian. Deskripsi ini meliputi isi dan struktur hukum positif dan hukum Islam yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 222.

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data tersebut dilakukan dua cara sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak, sehingga dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati dan meningkatkan kredibilitas data.

2. Menggunakan bahan referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya. Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi.

BAB IV

MEDIASI PERKARA KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA BIMA

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bima

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Bima (Mbojo)

Sejarah pengadilan Agama Bima (*mbojo*) erat hubungannya dengan datangnya Islam di pulau sumbawa dan sejarah kerajaan Bima (*mbojo*) itu sendiri. Oleh karena kedatangan Islam di Bima (*mbojo*) terjadi sejak zaman kolonial belanda.

Setelah kemerdekaan, sebagaimana Pengadilan Agama pada umumnya pada mulanya pengadilan Agama Bima (*mbojo*) ‘bagian’ merupakan kantor Departemen Agama kabupaten Bima (*mbojo*). Dengan terbitnya penetapan menteri Agama No. 5 tahun 1958 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah di sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Barat, maka bersama 32 Pengadilan Agama, Pengadilan Agama Bima secara hukum resmi terbentuk. Sekalipun demikian secara de facto gedung Pengadilan Agama Bima (*mbojo*) baru berdiri pada tahun 1976.

Dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama Bima:

- 1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1957 tentang Menetapkan Peraturan tentang Pengadilan Agama di Luar Jawa-Madura.
- 2) Penetapan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Barat.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bima (Mbojo)

VISI

“Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, profesional dalam memberi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

LAUDDIN
MAKASSAR

- © 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

... complete form

100



Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

Utara	: Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima
Selatan	: Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima
Barat	: Teluk Bima
Timur	: Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima

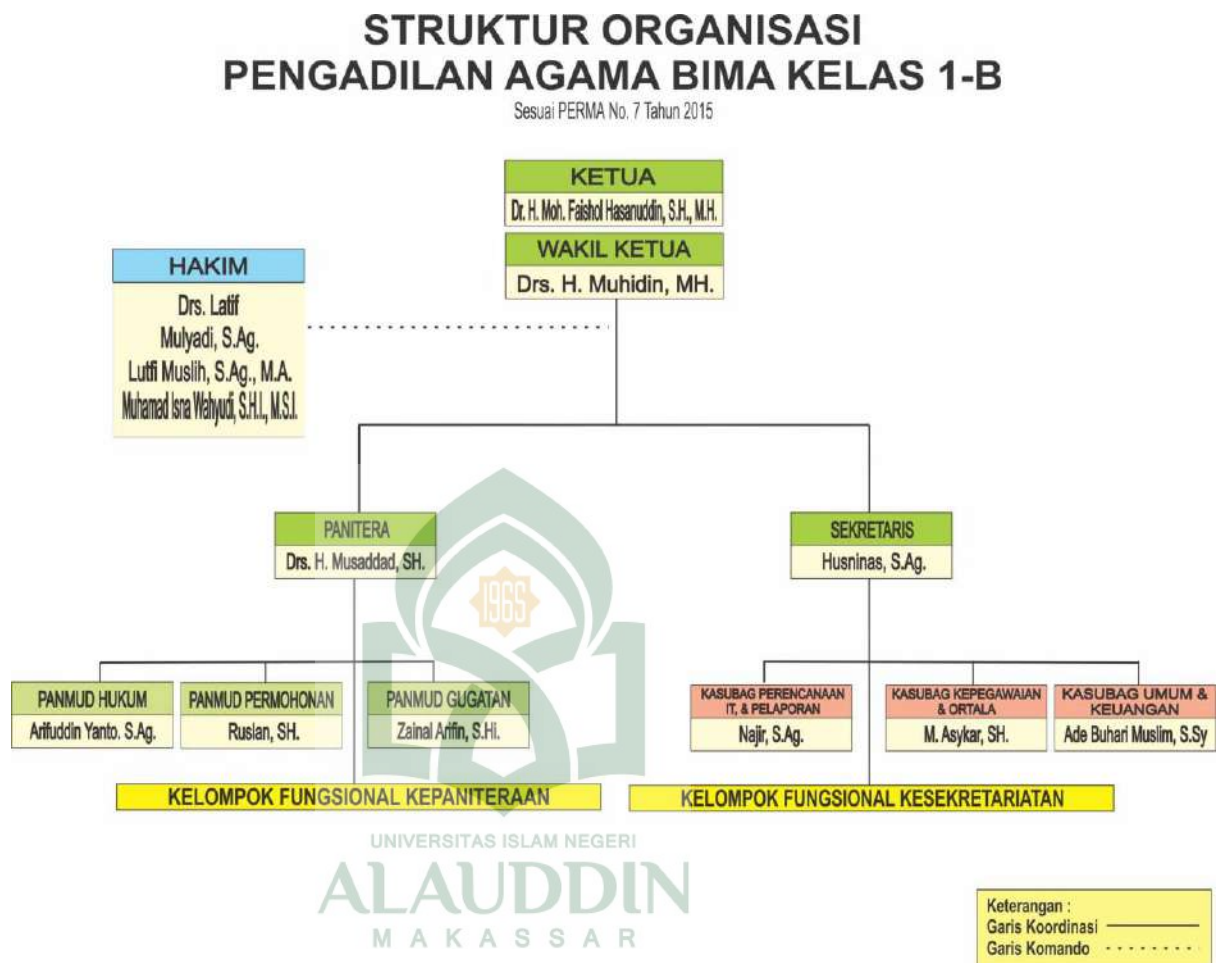
Kabupaten Bima (*mbojo*) adalah sebuah kabupaten di Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Ibu kotanya ialah Woha. Kabupaten Bima (*mbojo*) merupakan salah satu Daerah Otonom di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terletak di ujung timur dari Pulau Sumbawa bersebelahan dengan Kota Bima (*mbojo*) (pecahan dari Kota Bima). Secara geografis Kabupaten Bima (*mbojo*) berada pada posisi 117°40"-119°10" Bujur Timur dan 70°30" Lintang Selatan.

Kabupaten Bima (*mbojo*) memiliki 18 kecamatan, yakni :

- 1) Kecamatan Ambalawi
- 2) Kecamatan Belo
- 3) Kecamatan Bolo
- 4) Kecamatan Donggo
- 5) Kecamatan Lambitu
- 6) Kecamatan Lambu
- 7) Kecamatan Langgudu
- 8) Kecamatan Madapangga
- 9) Kecamatan Monta
- 10) Kecamatan Palibelo
- 11) Kecamatan Parado
- 12) Kecamatan Sanggar
- 13) Kecamatan Sape
- 14) Kecamatan Soromandi
- 15) Kecamatan Tambora
- 16) Kecamatan Wawo
- 17) Kecamatan Wera
- 18) Kecamatan Woha



4. Struktur Organisasi



Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Bima Kelas 1B Tahun 2017

B. Proses Penyelesaian Sengketa Waris melalui Mediasi dalam Putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm

1. Mediasi Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama Bima

Proses pendaftaran pengadilan itu sendiri didahului dengan mengajukan surat gugatan kepada Panitera Pengadilan Agama. Ketika surat telah diterima diwajibkan untuk membayar biaya perkara dan membuat SKUM (Surat kuasa Untuk Membayar). Kemudian perkara diberi nomor perkara sesuai dengan nomor SKUM, lalu panitera menyerahkan perkara kepada ketua Pengadilan Agama melalui wakil panitera atau juga boleh melalui panitera.

Proses penyelesaian sengketa waris secara mediasi oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama Bima Kelas IB sama dengan proses mediasi pada umumnya, dan sesuai dengan acuan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi sebagaimana telah diubah dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 yang pada intinya keharusan melaksanakan mediasi, karena bila tidak melaksanakan mediasi, maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum.⁴⁶ Berdasarkan hasil wawancara peneliti bahwa mediasi sangat penting sekali untuk menghindari terjadinya penumpukan perkara, jika perkara diselesaikan dengan mediasi artinya perkara diselesaikan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.⁴⁷

Untuk memimpin dan menjadi penengah dalam mediasi dibutuhkan mediator yang dapat mengontrol pelaksanaan mediasi supaya dapat berjalan secara efisien dan menemukan hasil akhir yang memuaskan, adapun syarat-syarat dari mediator, sebagai berikut :

⁴⁶Drs. H. Muhidin, M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima, *Wawancara*, tanggal 12 Oktober 2017.

⁴⁷Muhammad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I., Hakim Pengadilan Agama Bima, *Wawancara*, tanggal 03 Oktober 2017.

- a. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak.
- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak.
- e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.⁴⁸

Mediator memiliki peran sangat penting akan keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, hakim mediator dituntut memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Berikut daftar mediator di Pengadilan Agama Bima yang dapat peneliti sajikan melalui tabel di bawah ini.

Daftar Nama Mediator Pengadilan Agama Bima Kelas 1B

No	Nama	Pendidikan	Jabatan
1	Dr. H. Moh. Faishol Hasanuddin, M.H	S2	Hakim Madya Utama
2	Drs. H. Muhidin, M.H.	S2	Hakim Madya Utama
3	Drs. Latif	S1	Hakim Madya Muda
4	Mulyadi, S.Ag.	S1	Hakim Madya Muda
5	Lutfi Muslih, S.Ag., M.Ag.	S2	Hakim Pratama Madya
6	Muhamad Isna Wahyudi, S.HI., M.SI.	S2	Hakim Pratama Madya

Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Bima Kelas 1B Tahun 2017

⁴⁸Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2009), h. 64-65.

Pasal 13 PERMA No. 1 Tahun 2008 mengatur tentang mediator, selanjutnya peneliti melihat kualifikasi mediator pada pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (3) sebagai berikut:

- (1) Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.
- (2) Berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator yang bersertifikat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi Mediator dan pemberian akreditasi lembaga sertifikasi Mediator ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Pada pasal-pasal di atas mengenai kualifikasi mediator di pengadilan, berdasarkan wawancara peneliti bahwa hanya 1 (satu) mediator yang memiliki sertifikat mediator, yaitu Drs. H. Muhidin, MH., sehingga hakim mediator yang belum bersertifikat dimasukkan dalam daftar mediator yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bima.

Hakim mediator yang belum memiliki sertifikat mediator dikarenakan karena kurangnya biaya sehingga belum mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Mahkamah Agung RI.⁴⁹ Pelatihan mediator sangat terbatas jumlahnya karena diselenggarakan Mahkamah Agung RI secara nasional sehingga pesertanya sangat terbatas.

⁴⁹Muhammad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I., Hakim Pengadilan Agama Bima, *Wawancara*, tanggal 03 Oktober 2017.

Dalam hal ini dapat dilihat, tahap pelaksanaan mediasi sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Bima Kelas 1B terbagi menjadi 3 yaitu tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap implementasi hasil mediasi;

1. Tahap Pra Mediasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Isna, sebagai hakim sekaligus mediator di Pengadilan Agama Bima Kelas 1B, menyatakan bahwa setelah para pihak dipanggil pada sidang pertama, majelis hakim berkewajiban mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara⁵⁰. Apabila para pihak tidak bisa didamaikan oleh majelis hakim sebelum masuk pada pokok perkara sengketa kewarisan maka para pihak yang bersengketa wajib mengikuti proses mediasi sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan mahkamah agung.

Sebagaimana yang dituturkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bima Bapak Moh. Faishol Hasanuddin, Pertama mediasi diawali dengan pemberian penjelasan kepada para pihak tentang prosedur mediasi. Di mana mereka bisa memilih mediator dari luar, maka mereka harus menanggung biaya, tapi jika mediator internal maka tidak menambah biaya. Atas pemberian penjelasan tersebut maka para pihak menandatangani surat pernyataan bahwa telah diberikan penjelasan yang cukup mengenai mediasi.⁵¹ Sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (6) Perma No. 1 tahun 2008 bahwa:

“Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam perma ini kepada para pihak yang bersengketa”.⁵²

⁵⁰ Muhammad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I., Hakim Pengadilan Agama Bima, *Wawancara*, 3 Oktober 2017.

⁵¹ Dr. H. Moh. Faishol Hasanuddin, M.H., Ketua Pengadilan Agama Bima, *Wawancara*, 04 Oktober 2017.

⁵² Lihat Pasal 7 ayat (6) Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Di dalam Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan mengenai daftar mediator⁵³, sebagai berikut:

- a. Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, ketua pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latarbelakang pendidikan atau pengalaman para mediator.
- b. Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator.
- c. Jika dalam wilayah yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.
- d. Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan.
- e. Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator.
- f. Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbaharui daftar mediator.
- g. Ketua Pengadilan berwenang mengeluarkan nama mediator dari daftar mediator berdasarkan alasan-alasan objektif, antara lain, karena mutasi tugas, berhalangan tetap, ketidakaktifan setelah penugasan dan pelanggaran atas pedoman perilaku.

Ketentuan mengenai mediator yaitu mediator seharusnya bersertifikat sebagai mediator, sejalan dengan ketentuan dalam perma No. 1 tahun 2016 tentang mediasi di mana mediator harus bersertifikat, namun dalam keadaan

⁵³ PERMA NO. 1 Tahun 2008.

mediator yang bersertifikat tidak terpenuhi di pengadilan Agama bisa oleh hakim yang tidak menangani perkara tersebut.⁵⁴

Berdasarkan yang dituturkan oleh Bapak Moh. Faishol Hasanuddin, ketua pengadilan Agama Kelas IB Bima, menyatakan bahwa di Pengadilan Agama Bima keterbatasan mediator. Jangankan yang bersertifikat, sedangkan hakim saja banyak yang mengalami kendala. Jadi idealnya Pengadilan Agama kelas IB harus ada 12 hakim tapi karena hanya ada 5 orang hakim di mana satu hakim memiliki kesehatan yang tidak prima, dan hakim yang satu juga dinas di luar daerah.⁵⁵

Apabila tidak ditemukan kata sepakat dalam memilih mediator dan diserahkan kepada Majelis Hakim Untuk menunjuk mediator, maka pada hari itu juga Majelis Hakim menunjuk mediator bagi para pihak untuk melakukan mediasi dengan mengeluarkan surat penetapan penunjukan mediator.

Proses mediasi baru dapat dilaksanakan apabila para pihak yang berpekarra menghadiri sidang pertama secara prinsipal atau dapat diwakilkan dengan menggunakan surat kuasa khusus berdasarkan alasan yang sah.⁵⁶

Setelah itu maka mengenai bagaimana pelaksanaan proses mediasi akan diserahkan kepada mediator dan para pihak yang berperkara selama proses persidangan ditunda oleh majelis hakim sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat (5) perma No. 1 tahun 2008.

⁵⁴H. Moh. Faishol Hasanuddin, M.H., Ketua Pengadilan Agama Bima, *Wawancara*, 04 Oktober 2017.

⁵⁵Drs. H. Muhidin, M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima, *Wawancara*, tanggal 12 Oktober 2017

⁵⁶Muhammad Isna Wahyudi, Hakim di Pengadilan Agama Bima, *Wawancara*, 3 Oktober 2017.

2. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Setelah itu para pihak mendatangi ruang mediasi dalam catatan mediator tidak boleh mengadakan mediasi di luar pengadilan, dengan membawa surat penetapan penunjukan mediator oleh Majelis Hakim beserta resume perkara untuk diserahkan kepada mediator yang bersangkutan dan tergugat/termohon. Setelah mediator mempelajari isi gugatan secara mendalam dan mempersiapkan solusi untuk mendamaikan para pihak, maka diadakanlah mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati, mediator melakukan pendekatan secara psikologis dan rohani kepada para pihak. Dan apabila diperlukan mediator dapat melakukan pertemuan sendiri dengan salah satu pihak (kaukus)⁵⁷ untuk mendapatkan keterangan lebih lengkap. Seandainya tergugat tidak datang maka mediasi tidak dapat dilaksanakan kecuali diwakilkan dengan surat kuasa khusus berdasarkan alasan yang sah. Apabila mediator merasa para pihak tidak dapat didamaikan lagi karena tergugat tidak mau menghadiri proses mediasi atau para pihak menunjukkan itikad yang tidak baik, maka mediator berwenang menyatakan proses mediasi gagal tanpa harus menunggu berakhirnya jangka waktu yang diberikan. Di Pengadilan Agama Bima Kelas IB sendiri hanya terdapat satu ruang khusus mediasi dan jadwal pelaksanaan mediasi adalah pada hari senin, selasa, rabu, dan kamis setiap jam 09:30-12:00 WIB.

Menurut ketentuan Perma No. 1 Tahun 2008 mengenai jangka waktu mediasi diberikan selama 40 hari, tapi pelaksanaannya disini hanya selama 15 hari, dan apabila kesepakatan tidak tercapai maka hakim dapat memperpanjangnya lagi. Hal ini tergantung dari laporan mediator tentang hasil mediasi kepada hakim, apakah mediasi telah dinyatakan berhasil atau gagal ataupun mau diperpanjang

⁵⁷Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya, lihat Pasal 1 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2008.

lagi. Begitu juga yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Isna', bahwa dalam jangka waktunya selama 40 hari dengan waktu tambahan 14 hari dalam perma No. 1 tahun 2008. Sedangkan dalam perma No. 1 tahun 2016 waktu pelaksanaan mediasi selama 30 hari dengan waktu tambahan 30 hari.

Pelaksanaan proses mediasi cukup baik dan dapat dipahami oleh para pihak. Para pihak menyampaikan permasalahan mereka dan mediator berupaya untuk menengahi kedua belah pihak supaya permasalahan mereka dapat diselesaikan dengan damai dan keputusan akhir memenangkan kedua belah pihak sebagaimana perkara No. 0476/Pdt.G/2015/PA.BM yang peneliti teliti. Karena ada juga sengketa waris yang tidak dapat diselesaikan dengan baik-baik, dan malah hubungan keluarga atau kerabat yang rusak karena sengketa waris ini tidak dapat diperbaiki lagi. Kewenangan mediator di sini hanya memberikan solusi, yang terbaik bagi para pihak yang bersifat netral, yang mana solusi tersebut tetap menjaga keutuhan tali persaudaraan atau kerabat dan bahkan memperbaiki hubungan mereka antara keluarga yang sedang tegang. Selain melakukan proses mediasi, yang mempertemukan kedua belah pihak dan mediator, para pihak juga dapat melakukan pertemuan dengan mediator tanpa dihadiri oleh pihak lain, pertemuan ini disebut dengan kaukus. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada salah satu pihak untuk mengungkapkan kepentingannya, karena kepentingan tersebut tidak ingin didengar oleh pihak lawannya.

Hasil dari proses mediasi dapat berupa laporan, laporan proses mediasi gagal karena tidak tercapainya perdamaian. Dan juga dapat berupa laporan proses mediasi berhasil dengan kesepakatan perdamaian dan dibuatkan akta perdamaian. Selanjutnya hasil mediasi tersebut diberitahukan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk ditindaklanjuti.⁵⁸

⁵⁸Muhammad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I., Hakim Mediator di Pengadilan Agama Bima Kelas 1B, *Wawancara* (3 Oktober 2017).

3. Tahap implementasi Hasil Mediasi

a. Laporan mediasi gagal

Apabila dalam proses mediasi tidak mendapatkan kata sepakat dari para pihak, maka mediator berwenang menyatakan proses mediasi telah gagal dengan memberitahukan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Dalam permasalahan waris, mediator berwenang untuk memberikan solusi tentang pembagian harta warisan sesuai hukum Islam dan bukan kewarisan adat. Sesuai dengan pembagian masing-masing pihak dan kedua belah pihak membicarakannya, lalu mempertimbangkan solusi tersebut dan sama-sama sepakat.⁵⁹ Bila para pihak tidak menemukan kata sepakat dan damai dalam proses mediasi, maka mediator akan menyatakan proses mediasi gagal yang selanjutnya dilaporkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara. Sehingga perkara waris ini dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara oleh Majelis Hakim pada hari sidang selanjutnya.

b. Laporan proses mediasi berhasil

Proses mediasi berhasil apabila tercapainya perdamaian atau kata sepakat di antara para pihak. Apabila proses mediasi berhasil, maka mediator akan menyampaikan laporan tersebut kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Setelah itu, para pihak akan menandatangani akta perdamaian dan majelis hakim akan memberikan putusan perdamaian karena para pihak telah berdamai.

Mengenai akta perdamaian diserahkan kepada keinginan para pihak, apakah mereka ingin membuat akta perdamaian atau tidak. Maka para pihak telah dapat membagi harta warisan sesuai yang disepakati dan kembali hidup damai sebagai saudara atau kerabat dengan rukun.⁶⁰ Menurut pasal 1851 KUHPerdara,

⁵⁹Drs. Mukhtar Gani, M.H., Mantan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima, *Wawancara melalui Handphone*, tanggal 12 Oktober 2017.

⁶⁰Drs. Mukhtar Gani, M.H., Mantan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima, *Wawancara melalui Handphone*, tanggal 12 Oktober 2017.

perdamaian (*dading*) adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang berlangsung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.⁶¹ karena dalam suatu perkara waris pasti ada unsur benda, maka dibutuhkanlah akta perdamaian oleh kedua belah pihak.

Terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan bulan September tahun 2017 perkara kewarisan yang masuk dan yang terdaftar di Pengadilan Agama Bima sebanyak 55 perkara, dengan jenis perkara gugatan waris sebanyak 30 perkara dan permohonan penetapan pembagian harta peninggalan (P3HP) sebanyak 25 perkara. Perkara waris yang diputus dari tahun 2015 sampai september 2017 ada 43 perkara dengan jenis gugatan waris sebanyak 21 perkara dan P3HP 22 perkara.⁶² Dari 21 data perkara gugatan waris yang diputus, 1 (satu) perkara dapat diselesaikan melalui mediasi dan dapat mencapai kesepakatan damai.⁶³ Perkara gugatan waris yang telah diselesaikan pengadilan Agama Bima melalui mediasi ditemui pada putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm tahun 2015. Perkara tersebut diselesaikan melalui beberapa kali proses mediasi dan persidangan hingga para pihak dapat berdamai.⁶⁴

⁶¹Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1851.

⁶²Observasi perkara kewarisan dan P3HP yang diterima Pengadilan Agama Bima, (Bima, 16 Oktober 2017).

⁶³Observasi perkara kewarisan yang diputus Pengadilan Agama Bima, (Bima, 16 Oktober 2017).

⁶⁴Arifuddin Yanto, S.Ag., Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bima, 04 Oktober 2017.

DAFTAR PERKARA KEWARISAN (P3HP/ Penetapan Ahli Waris)

TAHUN 2015-2017

No	Jumlah Perkara yang diterima	Nomor Perkara	Jumlah Perkara yang diputus
1	Sebanyak 25 perkara	0006/Pdt.P/2015/PA.Bm	Sebanyak 22 Perkara
2		0007/Pdt.P/2015/PA.Bm	
3		0025/Pdt.P/2015/PA.Bm	
4		0119/Pdt.P/2015/PA.Bm	
5		0204/Pdt.P/2015/PA.Bm	
6		0210/Pdt.P/2015/PA.Bm	
7		0217/Pdt.P/2015/PA.Bm	
8		0233/Pdt.P/2015/PA.Bm	
9		0236/Pdt.P/2015/PA.Bm	
10		0296/Pdt.P/2015/PA.Bm	
11		0317/Pdt.P/2015/PA.Bm	
12		0007/Pdt.P/2016/PA.Bm	
13		0008/Pdt.P/2016/PA.Bm	
14		0009/Pdt.P/2016/PA.Bm	
15		0015/Pdt.P/2016/PA.Bm	
16		0017/Pdt.P/2016/PA.Bm	
17		33/Pdt.P/2016/PA.Bm	
18		110/Pdt.P/2016/PA.Bm	
19		203/Pdt.P/2016/PA.Bm	
20		232/Pdt.P/2016/PA.Bm	

21		243/Pdt.P/2016/PA.Bm	
22		2/Pdt.P/2017/PA.Bm	
23		146/Pdt.P/2017/PA.Bm	
24		1111/Pdt.P/2017/PA.Bm	

Sumber Data: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Bima Kelas 1-B.

Tabel di atas mengenai daftar perkara kewarisan (P3HP/Penetapan Ahli Waris) dari tahun 2015, 2016, dan 2017 menunjukkan bahwa jumlah perkara yang diterima sebanyak 25 perkara tapi dalam tabel hanya 24 perkara yang dicantumkan karena 1 perkara belum masuk dalam SIPP. sedangkan jumlah perkara yang diputus sebanyak 22 perkara.

DAFTAR PERKARA KEWARISAN (Gugatan Waris) TAHUN 2015-2017

No	Jumlah Perkara yang diputus	Nomor Perkara	Jumlah Perkara yang Berhasil Dimediasi
1	Sebanyak 21 perkara yang diputus	0076/Pdt.G/2015/PA.Bm	1 perkara berhasil di mediasi (0476/Pdt.G/2015/PA.Bm)
2		0123/Pdt.G/2015/PA.Bm	
3		0476/Pdt.G/2015/PA.Bm	
4		0653/Pdt.G/2015/PA.Bm	
5		1104/Pdt.G/2015/PA.Bm	
6		1215/Pdt.G/2015/PA.Bm	
7		1646/Pdt.G/2015/PA.Bm	

8	1579/Pdt.G/2015/PA.Bm
9	0076/Pdt.G/2015/PA.Bm
10	355/Pdt.G/2016/PA.Bm
11	410/Pdt.G/2016/PA.Bm
12	1207/Pdt.G/2016/PA.Bm
13	1208/Pdt.G/2016/PA.Bm
14	1298/Pdt.G/2016/PA.Bm
15	1676/Pdt.G/2016/PA.Bm
16	1867/Pdt.G/2016/PA.Bm
17	1885/Pdt.G/2016/PA.Bm
18	57/Pdt.G/2017/PA.Bm
19	273/Pdt.G/2017/PA.Bm
20	460/Pdt.G/2017/PA.Bm
21	721/Pdt.G/2017/PA.Bm
22	857/Pdt.G/2017/PA.Bm
23	1014/Pdt.G/2017/PA.Bm
24	1130/Pdt.G/2017/PA.Bm
25	1197/Pdt.G/2017/PA.Bm
26	1353/Pdt.G/2017/PA.Bm
27	1586/Pdt.G/2017/PA.Bm

Sumber Data: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Bima Kelas 1-B.

Berdasarkan tabel daftar perkara kewarisan (gugatan waris) dari tahun 2015 sampai 2017, bahwa jumlah perkara yang diputus sebanyak 21 perkara

sedangkan jumlah perkara yang berhasil dimediasi hanya 1 perkara yaitu perkara Nomor 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm. Jadi dari 21 perkara yang diputus hanya 1 perkara yang berhasil dimediasi, peneliti dapat mempersentasekan menjadi 4,76% sedangkan jumlah perkara yang tidak berhasil dimediasi 20 perkara jika dijadikan persen yaitu 95,24%. berdasarkan persentase perkara yang dimediasi tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi perkara gugatan waris di pengadilan Agama Bima masih sangat rendah.

Dalam tabel diatas, hanya 27 perkara yang dicantumkan nomor perkaranya dari 30 perkara yang terdaftar 3 perkara tidak tercantum karena belum dimasukan dalam SIPP Pengadilan Agama Bima.

2. Proses Mediasi Perkara Waris pada Putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm

Dalam perkara waris No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm pada sidang lanjutan yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Bima pada hari senin 11 Mei 2015 yang dihadiri kuasa para penggugat, tergugat I, dan tergugat II tidak menghadap ke persidangan. Kemudian majelis hakim berusaha menasehati/mendamaikan penggugat melalui kuasanya dan tergugat I agar perkara Gugatan Waris tersebut dapat diselesaikan dengan secara damai dan secara kekeluargaan dengan cara musyawarah dan mufakat di luar sidang pengadilan, namun tidak berhasil. Selanjutnya ketua majelis menyatakan bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg. Jo. Perma No. 1 Tahun 2008, maka kedua belah pihak terlebih dahulu menjalani proses mediasi oleh mediator dan ketua majelis mempersilahkan kepada para pihak untuk memilih mediator. Lalu atas persetujuan Kuasa Penggugat dan Tergugat I ketua majelis Pengadilan Agama Bima telah menunjuk Drs. Mukhtar, S.H., M.H. yang

juga merupakan wakil ketua pengadilan Agama Bima untuk menjadi mediator dalam upaya mediasi antara para penggugat dan para tergugat dengan penetapan NO. 0476/Pdt.G/2015/PA.BM. tanggal 11 Mei 2015.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketua majelis yang menangani perkara tersebut bahwa perkara waris tersebut sudah lama disengketakan di Pengadilan Negeri Raba Bima lebih kurang 20 tahun sampai ke tingkat kasasi.⁶⁶ karena yang menjadi objek sengketa tersebut dikuasai oleh orang lain.

Setelah mediatornya ditetapkan, maka proses mediasi diserahkan kepada mediator untuk menentukan kapan waktu pelaksanaan mediasinya. Berdasarkan wawancara peneliti dengan hakim mediatornya, para pihak dipanggil secara dinas oleh mediator melalui jurusita, maka pada waktu yang telah ditentukan para pihak dipanggil masuk diruangan mediasi dan disampaikan antara lain persyaratan mediasi, keuntungan kalau mediasi berhasil.⁶⁷ Dalam proses mediasinya, mediator melakukannya secara kaukus yaitu pertemuan yang dilakukan dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lain. Di mana mediator melakukan pertemuan dengan penggugatnya dulu kemudian tergugat. Pertemuan dilakukan secara terpisah untuk mendengarkan kedua belah pihak.

Tentang duduknya perkara, Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, dalam surat gugatan itu di jelaskan bahwa Nurlaela binti H. M. jafar Abdullah, Hj. Hajnah binti H. M. jafar Abdullah, Tangaya binti H. M. jafar Abdullah, Syahbudin bin H. M. jafar Abdullah, Muh. Rum Saleh bin H. M. jafar Abdullah (Penggugat I, II, III, IV, dan V) dan H. Tajudin bin H. M. jafar Abdullah, Rusnah

⁶⁵Berita Acara Sidang Perkara Gugatan Waris No. 0476/Pdt.G/2015/PA.BM.

⁶⁶Drs. Mulyadi, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Bima, *Wawancara* (tanggal 04 Oktober 2017).

⁶⁷Mukhtar Gani, selaku mantan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima, *Wawancara melalui Handphone*, tanggal 12 Oktober 2017.

binti H. M. jafar Abdullah (Tergugat I, dan II) adalah saudara kandung. Bahwa orang tua dari penggugat dan tergugat bernama H. M. jafar Abdullah telah meninggal dunia pada 17 Juni 2011 dan Siti Aminah binti Yahya telah meninggal dunia pada 7 Juli 2002. Selain meninggalkan ahli waris anak kandung sebanyak 7 orang, almarhum meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah, dan tanah kebun. Para penggugat mengajukan gugatan waris dengan menggunakan jasa pengacara yang juga merupakan penggugat. Setelah almarhum meninggal, harta warisan tersebut belum dibagi karena masih disengketakan di pengadilan Negeri. Harta tersebut diurus oleh Muh. Rum Saleh atau penggugat V sebagai orang yang telah diamanatkan/diberi kuasa oleh pewaris yang telah lama dikuasai oleh orang lain (Mustakim dkk) dan baru pada 28 Januari 2015 dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Raba Bima.

Setelah itu, pertemuan berikutnya mediator melakukan pertemuan secara bersamaan antara kedua belah pihak para penggugat dan tergugat untuk memberikan kesimpulan masing-masing dalam bentuk resume, kemudian disatukanlah apa yang menjadi tawaran dari penggugat dan tergugat.

Para pihak dalam perkara no. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm. sudah berusaha menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan, sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak mediator dalam perkara tersebut;

“jadi, semua perkara itu tidak mungkin diajukan sebelum ada penyelesaian secara kekeluargaan. Dalam permohonannya sudah diselesaikan secara kekeluargaan tapi tidak berhasil. Semua perkara kewarisan dalam permohonannya, sudah diselesaikan secara kekeluargaan bahkan sampai ke pemerintah desa tapi tidak berhasil, makanya mereka masukan di pengadilan Agama”.⁶⁸

⁶⁸Drs. Mukhtar Gani, M.H. Selaku mantan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima, Wawancara melalui telepon, tanggal 12 Oktober 2017.

Dalam pasal 13 ayat (3) Perma No. 1 tahun 2008 menentukan lama waktu untuk proses mediasinya selama 40 hari dan bisa diperpanjang selama 14 hari jika diperlukan. Tapi dalam perkara gugatan waris No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm waktu yang digunakan dalam proses mediasinya hanya satu minggu (tujuh hari) dan proses mediasinya berhasil mencapai kesepakatan. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, di mana pada sidang lanjutan tanggal 11 Mei 2015 sidang ditunda untuk proses mediasi. Dan pada tanggal 16 Mei 2015 kedua belah pihak yang berperkara telah mencapai kesepakatan bersama untuk berdamai dan pada tanggal 18 Mei 2015 pada sidang lanjutannya untuk mendengarkan laporan hasil mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm tanggal 18 Mei 2015 bahwa mediasi antara para penggugat/kuasanya dan para tergugat telah dilaksanakan secara maksimal dan telah berhasil dengan kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara untuk berdamai.⁶⁹

Antusiasme para pihak dalam perkara No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm dalam mengikuti proses mediasi tinggi. Hakim mediatornya mengatakan bahwa:

“karena mediasinya berhasil artinya antusiasme para pihak tinggi dalam menyelesaikan perkaranya melalui mediasi dari pada proses sidang. Karena kalau diselesaikan di luar perdamaian maka terjadi perpecahan di antara para keluarga itu, kalau damai sudah tidak terjadi lagi perpecahan, jadi antusiasmenya sangat tinggi”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, bahwa para pihak dalam perdamaian itu merumuskan kesepakatan dalam pembagian warisannya tidak berdasarkan pada ketentuan hukum kewarisan Islam maupun hukum adat, sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Drs. Mukhtar, S.H., M.H selaku mediator dalam perkara waris tersebut bahwa:

⁶⁹Data observasi dalam berita Acara Sidang Putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm. di Pengadilan Agama Bima, 15 Oktober 2017.

“kalau hukum kewarisan adat tidak berlaku di pengadilan, tapi diarahkan sesuai ketentuan hukum kewarisan Islam sekalipun mengabaikan hukum. kalau damai dalam pembagian warisannya tidak sesuai hukum waris Islam 2:1. Tapi tidak jadi masalah, yang penting tercapai perdamaian kesepakatan itu. Apakah melalui hukum adat atau tidak, tapi rata-rata itu berkaitan dengan hukum kewarisan Islam”.⁷⁰

Dan berdasarkan hasil pengamatan peneliti dalam akta perdamaian putusan 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm dalam pasal (1) disebutkan bahwa persoalan mengenai harta warisan diselesaikan secara musyawarah mufakat.⁷¹ Artinya, dalam pembagian harta warisan tersebut para pihak tidak membaginya berdasarkan ketentuan hukum waris Islam 2:1 walaupun sudah diarahkan oleh hakim mediatornya.

Setelah kesepakatan para pihak dirumuskan dengan dibantu oleh mediator, lalu mediator melaporkan hasil mediasi tersebut kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut bahwa telah berhasil dilakukan mediasi dengan usaha maksimal yang dilakukan di ruang mediasi pengadilan Agama Bima yang dihadiri oleh kuasa para penggugat dan tergugat I pada tanggal 18 Mei 2015.

2. Hasil Mediasi dalam Putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm

Apabila suatu perkara dapat diselesaikan dengan mediasi dan para pihak dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan dibantu oleh mediator maka kesepakatan tersebut dirumuskan dalam suatu akta perdamaian.

Dalam perkara kewarisan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm antara Nurlaela binti H. M. Jafar Abdullah, Hj. Hajnah binti H. M. Jafar Abdullah, Tangaya binti H. M. Jafar Abdullah, Syahbudin bin H. M. Taher Abdullah, Muh. Rum Saleh,

⁷⁰Mukhtar Gani, selaku mantan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima, *Wawancara melalui telepon*, tanggal 12 Oktober 2017.

⁷¹Hasil Observasi dalam Akta Perdamaian Putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm. di Pengadilan Agama Bima, 15 Oktober 2017.

S.H, sebagai Penggugat melawan H. Tajudin bin H. M. Jafar Abdullah, Rusnah binti H. M. Jafar Abdullah, sebagai Tergugat. Bahwa mediasi telah dilaksanakan dengan usaha maksimal pada tanggal 18 Mei 2015, bertempat di ruang Mediasi Pengadilan Agama Bima yang dihadiri oleh kuasa para penggugat dan Tergugat I, bahwa mediasi tersebut telah berhasil. Untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa persoalan mengenai harta Warisan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 2

Bahwa disepakati untuk itu para pihak mendapat masing-masing bagian sebagaimana tersebut dibawah;

- I. Tanah Sawah So'o Penatoi Kel. Penatoi Sebelah Selatan Jln. Gajah Mada Seluas 64 are.

No	Nama Penerima	Uraian	Lokasi
1.	Rusnah Binti H.M. Jafar	Tanah Sawah	So'o Penatoi Kel. Penatoi Jln. Gajah Madah
2.	Syahnudin Bin H.M Jafar	Tanah Sawah	SDA
3.	M. Rum Saleh, S.H	Tanah sawah dikurangi dari luas tanah untuk Jasa Kuasa Hukum 6,4 are	SDA

- II. Tanah sawah So'o Tolo Tando Kel. Matakando seluas 2,7 Ha

No	Nama Penerima	Uraian	Lokasi
1.	Syahnudin Bin H.M Jafar	Tanah Sawah	Tanah So'o Tolo Tando Kel. Matakando
2.	Rusnah Binti H.M. Jafar	Tanah Sawah	SDA
3.	Nurlailah Binti H.M Jafar	Tanah sawah	SDA
4.	Hj. Hajnah Binti H.M. Jafar	Tanah sawah	SDA

5.	H. Tajudin Bin H.M.	Tanah sawah	SDA
6.	Jafar	Tanah sawah	SDA
	M. Rum Saleh, S.H	dikurangi dari luas tanah untuk Jasa Kuasa Hukum 27 are	

III. Tanah So'o Penatoi Sebelah Timur Jln. Gatot Subroto Seluas 21 Ha

No	Nama Penerima	Uraian	Lokasi
1.	H. Tajudin Bin H.M. Jafar	Tanah Sawah	Tanah So'o Penatoi Sebelah Timur Jln. Gatot Subroto Kel. Penatoi
2.	Nurlailah Binti H.M Jafar	Tanah Sawah	SDA
3.	M. Rum Saleh, S.H	Tanah sawah dikurangi dari luas tanah untuk Jasa Kuasa Hukum 21 are	SDA

IV. Tanah Sawah So'o Santi Kel. Santi, Sebelah Barat Jln. Gatot Subroto Seluas ±70 are

No	Nama Penerima	Uraian	Lokasi
1.	Para ahli waris	Tanah tersebut di atas untuk dijual bersama oleh para ahli waris, dikurangi dari jasa kuasa hukum 7 are	Tanah So'o Santi Kel. Santi sebelah barat Jln. Gatot Subroto Kel. Penatoi
2.	M. Rum Saleh, S.H	Tanah sawah dikurangi dari luas tanah untuk Jasa Kuasa Hukum 7 are	SDA

V. Tanah Kebun So'o Jenamawa/Oi Niu Kel. Dara Seluas ±1,4 Ha

No	Nama Penerima	Uraian	Lokasi
1.	Para ahli waris	Tanah Kebun tersebut di atas untuk dijual bersama oleh para	Tanah So'o Santi Kel. Santi sebelah barat Jln. Gatot Subroto Kel. Penatoi

2.	M. Rum Saleh, S.H	ahli waris, dikurangi dari jasa kuasa hukum 14 are Tanah kebun dikurangi dari luas tanah untuk Jasa Kuasa Hukum 14 are	SDA
----	-------------------	---	-----

VI. Tanah Sawah So'o Nonu desa Belo Kec. Palibelo

No	Nama Penerima	Uraian	Lokasi
1.	Drs. Abdul Hafid M. Saleh	Untuk Jasa Penanganan Perkara ± 20 Tahun Perkara H.M. Jafar M. Abdullah	Tanah sawah So'o Nonu Desa Belo Kec. Palibelo

Pasal 3

Bahwa dengan terjadinya penyelesaian secara musyawarah mufakat atas harta warisan ini, maka antara pihak penggugat dan tergugat tidak ada lagi permasalahan mengenai harta-harta tersebut.

Pasal 4

Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam akta perdamaian yang dituangkan dalam putusan.⁷²

Selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan, yang berisi:

Telah membaca surat perdamaian persetujuan tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA No. 1 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

⁷²Akta Perdamaian dalam Putusan Perkara No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm.

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas.
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 401.000,- (Empat ratus seribu rupiah) masing-masing separuhnya;

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mediasi Waris Putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm.

1. Tinjauan Praktik Mediasi Waris Putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm. dengan Pendekatan Normatif

Praktik mediasi dalam penyelesaian sengketa kewarisan pada putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm jika ditinjau secara normatif telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Diharapkan dengan berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ini, proses penyelesaian sengketa kewarisan secara mediasi oleh hakim di Pengadilan Agama Bima Kelas IB dapat berjalan lancar dan efisien, serta diakhiri dengan kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang bersengketa. Karena merupakan kewajiban bagi pengadilan untuk menyelenggarakan mediasi terhadap perkara yang masuk ke pengadilan tingkat pertama. Walaupun terdapat beberapa kendala dalam implementasi mediasi itu sendiri.

Pada tahap pra mediasi dalam perkara waris pada putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.BM pada sidang pertama penggugat/kuasa hukumnya tidak hadir dengan alasan yang sah dan tergugat I hadir. Kemudian majelis hakim menunda sidang untuk melakukan panggilan sekali lagi kepada pihak

penggugat/kuasa hukumnya sebagaimana diatur dalam hukum acara peradilan agama.

Pada sidang lanjutan para pihak hadir dalam persidangan, majelis hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Hakim mendorong para pihak atau kuasa hukumnya untuk berperan langsung dalam proses mediasi. Sebelum itu, majelis hakim sudah menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak, lalu majelis hakim menunda persidangan supaya para pihak menempuh proses mediasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Bab I pasal 7 ayat (1), (3), (5), (6) PERMA No. 1 Tahun 2008.

Dalam pasal 8 disebutkan bahwa:

- “(1) Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut:
- a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan.
 - b. Advokat atau akademisi hukum.”⁷³

Berdasarkan pasal di atas para pihak diberikan hak untuk memilih mediator, karena para pihak tidak memilih mediator maka majelis hakim atas persetujuan para pihak menunjuk Drs. M. Mukhtar, S.H., M.H sebagai mediator dalam perkara No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm, karena belum ada dari pihak luar yang memenuhi syarat⁷⁴, seperti advokat atau akademisi hukum yang menjadi mediator di pengadilan Agama Bima.

Para pihak menempuh proses mediasi dengan I'tikad baik sehingga mampu mencapai perdamaian, hal ini telah sesuai dengan pasal 12 dalam PERMA No. 1 Tahun 2008.

Mengenai jangka waktu pelaksanaan mediasi dalam pasal 13 ayat (3) bahwa paling lama 40 hari kerja dan atas kesepakatan para pihak dapat

⁷³Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 *tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, h. 6.

⁷⁴Syarat untuk menjadi mediator berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 adalah telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung RI.

diperpanjang paling lama 14 hari kerja. Tapi dalam pelaksanaan proses mediasi perkara pada putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm lebih cepat yaitu selama satu minggu (lima hari kerja) berhasil mencapai perdamaian. Dengan demikian tidak membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang banyak. Dengan cepat terjadinya perdamaian, maka Asas penting yang menjadi landasan peradilan Indonesia adalah bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat 2 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) dapat terlaksana. Tiga asas tersebut secara substansial adalah hal yang mendasari diletakkannya lembaga perdamaian dalam sistem peradilan sebagai lembaga yang krusial keberadaannya. Signifikansi perdamaian secara jelas bisa dilihat dalam Pasal 16 ayat 2 UU No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”.⁷⁵

Mediator telah melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan ketentuan pasal 15 PERMA No. 1 Tahun 2008, dimana mediator membahas jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak dan disepakati. Dalam proses mediasinya para pihak penggugat/kuasa hukumnya dan tergugat berperan langsung dalam mediasi. Dalam pelaksanaan mediasinya, salah satu taktik dan tehnik dari mediator dengan mengadakan kaukus yaitu pertemuan dengan pihak penggugat kemudian pihak tergugat secara terpisah kemudian dipertemukan secara bersamaan sehingga para pihak dapat bersepakat untuk damai.

Kaukus telah diatur dalam Pasal 14 huruf e PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu “menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya

⁷⁵Pasal 16 ayat 1 UU no. 4 tahun 2004 berbunyi “pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

(kaukus)”. Pertemuan terpisah merupakan aspek penting dalam proses mediasi yang sifatnya rahasia.

Mediator mempunyai alasan dan tujuan dalam mengadakan pertemuan terpisah, misalnya:

- a. Untuk menggali hal-hal yang tidak terungkap dalam pertemuan yang dihadiri pihak lawan.
- b. Untuk memberikan suasana yang lebih dinamis dan cair antara para pihak dengan mediator.
- c. Dalam tahap kaukus moderator bisa membaca sejauh mana kesungguhan pihak yang bersengketa untuk berdamai.
- d. Untuk memberikan pendapat hukum terhadap sengketa yang dihadapi.
- e. Untuk mengarahkan para pihak supaya fokus pada perundingan yang konstruktif dan menghindari hal-hal yang kontra produktif bagi perundingan.
- f. Memungkinkan mediator dan para pihak yang bersengketa mempertimbangkan model penyelesaian sengketa yang lebih variatif.⁷⁶

Pelaksanaan kaukus sifatnya tidak wajib, dilaksanakannya kaukus atau tidak semata-mata tergantung pada penilaian mediator apakah ada urgensi dilaksanakannya kaukus atau tidak.⁷⁷ Yang harus diperhatikan mediator dalam kaukus adalah bahwa kaukus merupakan pertemuan terpisah antara mediator dengan satu pihak tanpa dihadiri pihak lain, maka rawan terjadinya kecurigaan. Jadi sebelum melakukan kaukus mediator harus membangun kepercayaan dari kedua belah pihak dengan menjelaskan bahwa kaukus adalah pertemuan dengan salah satu pihak saja.

⁷⁶Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 104.

⁷⁷Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, h. 105.

Dalam proses mediasinya mediator dan para pihak tidak melibatkan ahli walaupun dalam pasal 16 disebutkan bahwa mediator dapat mengundang ahli atas persetujuan para pihak atau kuasa hukumnya. Setelah menghasilkan kesepakatan perdamaian dalam putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.BM kemudian para pihak dengan bantuan mediator merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis. Kemudian pada sidang lanjutan tgl 18 Mei 2015 para pihak menghadap di persidangan untuk memberitahukan kepada majelis hakim bahwa telah terjadinya kesepakatan perdamaian dan meminta untuk dikuatkan dalam akta perdamaian dan dimasukkan dalam putusan. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 17 PERMA No. 1 Tahun 2008.

Dalam mediasi waris, persengketaan yang terjadi di antara para pihak berkaitan dengan pembagian harta warisan. Sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa waris dapat bertumpu pada beberapa prinsip yaitu keadilan, mis lu haz al-unsu yain (dua banding satu) yang dapat diterapkan secara fleksibel dan prinsip kesepakatan damai. Jadi, esensi dari hukum kewarisan Islam adalah keadilan, kedamaian, dan pemanfaatan harta warisan oleh ahli waris secara adil dan damai.⁷⁸

Perkembangan hukum Fiqh Indonesia dalam hal pembagian harta warisan cenderung tidak terpaku pada ketentuan 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Pasal 176 KHI mengatur besarnya porsi antara anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan. Kepastian ketetapanannya berpegang teguh pada norma Q.S. al-Nisa/4:11. Untuk sekedar alternatif atas kemantapan norma Q.S. al-Nisa/4:11, pasal 183 membuka kemungkinan untuk menyimpang melalui jalur “perdamaian”. Dengan demikian jika pasal 176 dikaitkan dengan alternatif yang digariskan Pasal 183 KHI, patokan besarnya penerapan porsi pembagian

⁷⁸Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h. 197-198.

harta warisan antara anak laki-laki dengan anak perempuan, dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bagian anak laki-laki dua banding satu (2:1) dengan bagian anak perempuan.
- 2) Tetapi melalui “Perdamaian” dapat disepakati oleh para ahli waris jumlah pembagian yang menyimpang dari ketentuan pasal 176.⁷⁹

Dalam pembagian harta warisan pada putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm para ahli waris bersepakat untuk berdamai dan membagi harta warisan berdasarkan kerelaan. Hal ini sesuai dengan aturan sebagaimana ketentuan KHI dalam pasal 183 yang menyatakan bahwa “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

Pasal tersebut menjadi acuan dalam pembagian warisan secara damai dengan mengedepankan kerelaan bersama, walaupun pasal ini mengakibatkan pembagian warisan yang berbeda dari petunjuk pembagian warisan yang telah ditentukan dalam Bab III Kompilasi Hukum Islam namun hal ini tetap dibenarkan demi tercapainya kemaslahatan di antara para ahli waris.

2. Tinjauan Praktik Mediasi Waris Putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm. dengan Pendekatan Yuridis

Jika ditinjau dari hukum Islam dalam praktik mediasi waris putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm di mana sengketa diselesaikan secara perdamaian berupa mediasi sesuai dengan konsep *As-sulh*. *Sulh* merupakan suatu jalan untuk mengakhiri sengketa yang terjadi melalui perdamaian yang dapat dilakukan di depan maupun di luar pengadilan dengan pertimbangan bahwa *sulh* dapat memuaskan para pihak dan tidak ada pihak yang merasa menang atau kalah

⁷⁹M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 47.

sehingga *sulh* dapat mengantarkan pada ketentraman hati, kepuasan dan memperkuat tali silaturahmi.⁸⁰ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. al-Hujurat/49:10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ^{٨٠} وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat Rahmat”.⁸¹

Berdasarkan ayat tersebut, memberikan petunjuk bahwa Allah swt., sangat menganjurkan perkara atau sengketa di antara keluarga atau masyarakat pada umumnya secara damai melalui musyawarah untuk mencari jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak yang berperkara.

Keberadaan Sulh sebagai upaya damai dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Q.S al-Nisa/4:114.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ
بَيْنَ النَّاسِ^{٨١} وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ
أَجْرًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.”⁸²

⁸⁰Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h. 159-160.

⁸¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 516.

⁸²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 97.

Proses penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga dikenal dengan hakam sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S al-Nisa/4:35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahnya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁸³

Kata *hakam* dalam ayat di atas dapat dipahami dalam arti pemberi putusan. Para ulama mengemukakan makna *Al-Hakam* adalah “Dia yang meleraikan dan memutuskan kebenaran dari kebatilan, yang menentukan siapa yang taat dan durhaka, serta memberi balasan yang setimpal bagi setiap usaha, semuanya berdasar ketetapan yang ditetapkan”.⁸⁴

Ayat di atas menganjurkan adanya pihak ketiga sebagai penengah atau mediator dalam penyelesaian sengketa. Walaupun *asbab an-nuzul* ayat di atas mengenai sengketa keluarga, namun konsep hakam dapat diaplikasikan pada sengketa perdata lain seperti sengketa kewarisan. Dalam peradilan yang disebut sebagai hakam adalah mediator yang bisa berasal dari hakim, advokat, akademisi hukum, atau pegawai pengadilan yang memiliki sertifikat.

Praktik Pembagian harta warisan secara damai di pengadilan Agama Bima dalam putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm dilakukan dengan takharuj. *Al-Takharuj* pada prinsipnya merupakan salah satu bentuk pembagian harta warisan

⁸³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h.84.

⁸⁴Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, h. 91-92.

secara damai berdasarkan musyawarah antara para ahli waris yang telah disepakati secara bersama-sama. Kebolehan pembagaian harta warisan secara damai didasarkan pada atsar sahabat pada masa pemerintahan khalifah Ustman bin Affan sebagai berikut:

عن أبي يوسف عن حدثه عمرو بن دينار عن ابن عباس : ان حدي نساء
عبدالرحمن بن عوف صلحوها على ثلاثة و ثمانين الفاعلى اخرجوها من
ميراث.

Artinya:

“Dari Abi Yusuf dari seseorang yang menceritakan kepadanya, dari Amru bin Dinar dari Ibnu Abbas: Salah seorang istri Abdurrahman bin ‘Auf diajak untuk berdamai oleh para ahli waris terhadap harta sejumlah delapan puluh tiga ribu dengan mengeluarkannya dari pembagian harta warisan”.⁸⁵

Selain itu, dasar hukumnya adalah analogi terhadap perjanjian jual beli dan perjanjian tukar menukar barang yang syarat kebolehannya adalah adanya keridhaan (kerelaan) masing-masing pihak yang mengadakan transaksi. Hal tersebut didasarkan pada Q.S. al-Nisa/4:29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

⁸⁵Zilfaroni, *Analisis terhadap pendapat Hanafiah tentang Tahkaruj* (<https://zilfaroni-putratanjung.blogspot.co.id/2012/05/analisis-terhadap-pendapat-hanafiah.html>), h. 1. (diakses tanggal 15 November 2017)

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁸⁶

Ayat di atas memberi petunjuk tata cara memperoleh harta yang halal untuk dimakan, yakni dengan jalan perniagaan (transaksi jual beli) atas keridhaan masing-masing pihak.

Al-takharuj dan praktik pembagian harta warisan secara damai di pengadilan Agama dilakukan atas dasar keridhaan (kerelaan) masing-masing pihak.⁸⁷

Takharuj adalah pembagian harta warisan secara damai dengan prinsip musyawarah. Pembagian harta warisan dengan metode tersebut, para ahli warislah yang berperan dan berpengaruh dalam menentukan, baik cara pembagiannya maupun besar bagian para ahli waris. Pembagian harta warisan dalam bentuk ini dapat saja keluar dari ketentuan pembagian harta warisan yang telah ditetapkan berdasarkan al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw., namun atas dasar kesepakatan dan kerelaan antara para ahli waris untuk kemaslahatan para ahli waris.

D. Analisis terhadap Proses Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris pada Putusan No.0476/Pdt.G/2015/PA.Bm

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di pengadilan Agama Bima pada putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm telah sesuai dengan pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg Jo. PERMA No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Di mana

⁸⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 83.

⁸⁷Harijah Damis, *Al-Takharuj dan pembagian harta warisan secara damai di Pengadilan Agama*, <http://www.pa-palembang.go.id/al-takharuj-dan-praktik-pembagian-harta-warisan-secara-damai-di-pengadilan-agama-oleh-dr-hj-hari-jah-damis-mh--67-&catid=135:artikel&Itemid=182>. (diakses pada 15 November 2017).

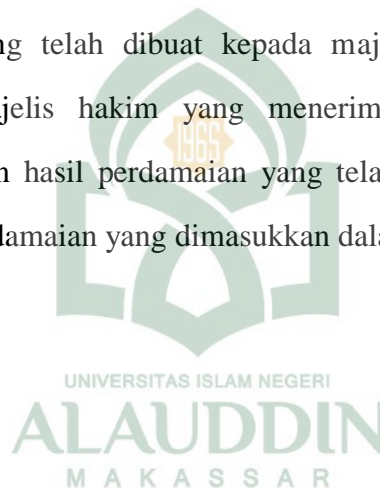
jika tidak dilakukan prose mediasi maka seluruh proses persidangan dan putusan pengadilan akan batal demi hukum.

Dalam sengketa waris putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm, pada sidang pertama tergugat I hadir sedangkan para penggugat/kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan dengan alasan yang sah. Karena ketidakhadiran salah satu pihak dalam perkara waris ini, maka mediasi tidak bisa dilakukan. Setelah itu, pada sidang lanjutan setelah para pihak penggugat/kuasa hukumnya dan tergugat I hadir dalam persidangan. Setelah di nasehati dan di damaikan oleh majelis hakim tapi tidak bisa, maka kedua belah pihak harus menjalani tahap berikutnya proses mediasi.

Dalam proses mediasi inilah, seorang mediator harus memiliki Skill dan berperan dalam memberikan solusi yang terbaik untuk penyelesaian sengketa kewarisan antara para pihak. Dalam putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.BM, proses mediasi dilakukan setelah jadwal pertemuan ditentukan. Adapun upaya yang telah dilakukan mediator dalam proses mediasi yaitu dengan melakukan kaukus atau pertemuan dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lain. Di mana mediator mengadakan pertemuan dengan pihak penggugat/kuasa hukumnya dulu kemudian pertemuan dengan pihak tergugat secara terpisah. Setelah itu, mediator mengadakan pertemuan secara bersamaan antara kedua belah pihak, untuk memberikan kesimpulan masing-masing. Dan akhirnya sengketa kewarisan yang telah lama disengketakan selama 20 tahun, di pengadilan Negeri sampai kasasi ke tingkat Mahkamah Agung karena harta warisan tersebut dikuasai oleh orang lain, dan karena pihak penggugat meragukan i'tikad tergugat untuk mengalihkan harta warisan tersebut akhirnya bisa diselesaikan secara damai antara para ahli waris. Dan mereka membagi harta warisan tersebut berdasarkan musyawarah dan kerelaan antara para ahli waris, pembagian tersebut setelah mediator mengarahkan

untuk membagi harta warisan berdasarkan hukum kewarisan Islam. dalam pembagian harta warisan secara damai, para pihak tidak mengikuti ketentuan pembagian warisan berdasarkan hukum kewarisan Islam 2:1 demi tercapainya kemaslahatan diantara para ahli waris.

Setelah terjadi kesepakatan damai, mediator merumuskan isi kesepakatan-kesepakatan para pihak yang bersengketa secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak sebagai bukti bahwa para pihak benar-benar sepakat untuk menghentikan sengketa dan memilih jalan perdamaian. Setelah kesepakatan damai selesai dan dibacakan kepada para pihak, mediator melaporkan hasil kesepakatan yang telah dibuat kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Majelis hakim yang menerima laporan perdamaian dari mediator, membacakan hasil perdamaian yang telah dilaporkan dan di kuatkan dalam bentuk akta perdamaian yang dimasukkan dalam putusan akhir.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara garis besar proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris pada putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm. telah sesuai dengan aturan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan telah mencapai perdamaian. Pelaksanaan mediasi tidak mencapai batas waktu 40 hari kerja sebagaimana diatur dalam PERMA, tapi hanya 1 minggu saja atau 5 (lima) hari kerja. Untuk mencapai perdamaian mediasi dilakukan sebanyak 2 kali, dimana pada mediasi pertama mediator melakukan kaukus, pertemuan dengan para penggugat/kuasa hukumnya terlebih dahulu dan pihak tergugat secara terpisah. Kemudian mediasi yang kedua, pertemuan secara bersamaan antara kedua belah pihak dan mendengarkan kesimpulan masing-masing sehingga mencapai kesepakatan dan dibuat akta perdamaian.
2. Proses Mediasi dalam putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm. jika ditinjau dari hukum Islam sesuai dengan konsep *Sulh* atau *Islah* dalam surat Al-Hujurat/49:10 dan surat Al-Nisa/4:114 dan konsep *Hakam* dalam Surat Al-Nisa/4:35. Dalam penyelesaian sengketa waris dalam proses mediasi dilakukan dengan *takharuj* berdasarkan kerelaan dan kesepakatan para pihak dan tidak mengacu pada ketentuan pembagian warisan dalam hukum kewarisan Islam. Penyelesaian pembagian warisan dengan *takharuj* dilakukan setelah para ahli waris mengetahui bagiannya masing-

masing di mana ahli waris anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan satu bagian (2:1).

B. *Implikasi Penelitian*

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pada implikasi ini dikemukakan beberapa saran atau masukan yang terkait dengan penelitian sebagai berikut:

1. Bagi para pihak yang bersengketa terutama mengenai sengketa kewarisan Islam, para pihak harus lebih memprioritaskan hubungan kekerabatan dari pada harta. Dan untuk pembagian harta warisan selalu berpegang teguh pada prinsip keadilan sosial, persaudaraan, toleransi, dan saling menghargai terhadap hak-hak orang lain.
2. Apabila telah meninggal seseorang dan meninggalkan harta warisan dan ahli warisnya, hendaknya harta warisan tersebut segera dibagi sebelum keutuhan harta tersebut terbagi-bagi, berpindah tangan dan dikuasai oleh orang lain.
3. Mediator yang menangani sengketa kewarisan harus memiliki *Skill* untuk melakukan penyelesaian dan pendekatan terhadap para pihak, terutama pendekatan psikologis yang akan menjadi motivasi bagi para pihak untuk mencapai perdamaian. Selain itu perlu adanya peningkatan mediator yang memiliki sertifikat untuk lebih memudahkan penerepan mediasi di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2009.

Ali, Atabik, Mudhlor, Ahmad Zuhdi. *Kamus Kontemporer (Arab Indonesia)*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999.

Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadzah Madah University Press, 2012.

Asti, Widia. Skripsi tentang "Implementasi PERMA No.1 Tahun 2008 Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian. (Studi Kasus di Pengadilan Agama Makassar)" Gowa, 2015.

Damis, Harijah. *Al-Takharuj dan pembagian harta warisan secara damai di Pengadilan Agama*, http://www.pa.palembang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=393:al-takharruj-dan-praktik-pem-bagian-harta-warisan-secara-damai-dipengadilan-agama-oleh-dr-hj-harijah-damis-mh-67&catid=135:artikel&Itemid=182. (15 November 2017).

Dermawan, Doni. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan", <http://www.pta-jambi.go.id/11-artikel/3870-implementasi-peraturan-mahkamah-agung-ri-nomor-1-tahun-2016-tentang-prosedur-mediasi-di-pengadilan> (15 April 2017).

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

-----*Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*. Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Hidayat, Maskur. *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2016.

John Michael Hoynes, Cretchen L. Haynes dan Larry Sun Fang, *Mediation: Positive Conflict Management*, (New York: SUNY Press, 2004), dikutip dalam Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, 2009.

- Jurnal al-ahkam STAIN Palopo, “*Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama melalui Proses Mediasi*” Vol. IV No. 2 (Agustus 2014) <https://jurnalalahkamstainpalopo.wordpress.com/2014/09/28/tinjauan-yuridis-peny-elesaian-sengketa-di-pengadilan-agama-melalui-proses-mediasi/> (16 Mei 2017).
- Kamal, Abu Malik. *Fiqh Sunnah Lin Nisaa’*. Cet. I; Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwiddan Terjemahnya*. Solo: Abyan, 2014.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Al-Mahalliy, Jalaludin, Imam. *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat Surat Az Zumar s.d. Surat an Nas*. Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Cet. 5; Jakarta: Kencana, 2008.
- Mustari, Abdillah. *Hukum Waris (Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata Barat)*. Cet. I; Gowa: Alauddin University Press, 2014.
- Putusan No. 0476/Pdt.G/2017/PA.Bm. Bima, diputus tanggal 18 Mei 2015.
- Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- , *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Republik Indonesia. “Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam” dalam Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Sakti, Bima Cahya. “*Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam*”, Skripsi (Jember: Fak. Hukum Universitas Jember, 2014), h. xii-xiii, <http://repository.unej.ac.id/> (01 April 2017).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesandan Keserasian Al-qur'an)* Vol. 13; Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermassa, 1992.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfa Beta, 2014.
- Supardin. *Fikih Peradilan Agama di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu)*. Gowa: Alauddin University Press, 2014.

- Talli, Abd. Halim. Efektifitas Mediasi Pada Pengadilan Agama di Sulawesi Selatan. Laporan Penelitian, 2014.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998.
- Wirhanuddin. *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Semarang: Fatawa Publishing, 2014.
- Zilfaroni. *Analisis terhadap pendapat Hanafiah tentang Tahkaruj* (<https://zilfaroni-putratanjung.blogspot.co.id/2012/05/analisis-terhadap-pendapat-hanafiah.html>), (diakses tanggal 15 November 2017).



LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Kampus I Jl. Slt Alauddin Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata - Gowa Tlp. (0411) 424835 Fax 424836

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 466 Tahun 2017
T E N T A N G
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

- Menimbang :**
- a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, untuk itu dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing;
 - b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai Dosen Pembimbing Draft/Skripsi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 205 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.
 6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- 1. Menetapkan :**
- a. Menunjuk saudara : 1. Dr. H. Supardin, M.H.I.
2. Dr. Hamzah, M.H.I.

Sebagai pembimbing mahasiswa :

Nama : Yuliyanti

NIM : 10100114100

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Peradilan

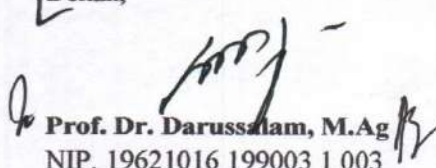
Judul Skripsi : MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm)

- b. Melaksanakan pembimbing skripsi sampai mahasiswa tersebut selesai karya tulis ilmiah dengan baik;
- c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
- d. Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa

Pada tanggal : 02-05-2017

Dekan,


Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan:

Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor 225 Tahun 2017

TENTANG

PANITIA, PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca

: Surat Permohonan

Nama

: Yuliyanti

NIM

: 10100114100

Jurusan

: Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Hari/Tanggal

: Selasa, 19 Desember 2017

Prihal

: Ujian Seminar Hasil/Skripsi

Judul

: "Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan No. 0476/Pdt.G/ 2015/ PA.Bm)"

Menimbang

- a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua

: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

Sekretaris

: Dr. Hj. Patimah, M.Ag

Penguji I

: Dr. H. Abd. Halim Talii, M.Ag

Penguji II

: Dr. Abdillah Mustari, M.Ag

Pelaksana

: 1. Mujahidah, S.E

2. Nurhayati Wahid

Kedua

Ketiga

- : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Samata Gowa
Pada tanggal : 19 Desember 2017

Dekan

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 19621016 199003

Tembusan :

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;
(Sebagai Laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa
Telp. 841879 Fax 8221400

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 618 Tahun 2018
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI TAHUN 2018

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca : Surat Permohonan
Nama : Yuliyanti
NIM : 10100114100
Jurusan : Hukum Acara Peradilan dan Keluarga
Hari/Tanggal : Rabu, 28 Maret 2018
Prihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi
Judul : "Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Bima Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm)"

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Junto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Dr. Hamsir, M.Hum
Penguji I : Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag
Penguji II : Dr. Abdillah Mustari, M.Ag
Pelaksana : 1. Muh. Amzar, S.Ag
2. Sufirman

Kedua : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Munaqasyah/Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2018;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Samata Gowa
Pada tanggal : 28 Maret 2018
Dekan

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa; (Sebagai Laporan)

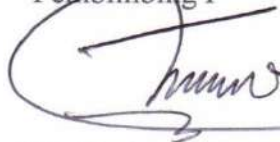
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi yang berjudul “Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm)”, yang disusun oleh Yuliyanti, NIM: 10100114100, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diteliti dan dikoreksi secara seksama serta disetujui untuk diseminarkan (seminar proposal).

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 17 Mei 2017 M
20 Sya’ban 1438 H

Pembimbing I



Dr. H. Supardin, M.H.I
NIP: 196503021994031003



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

Pembimbing II



Dr. Hamzah, M.H.I.
NIP: 196312311993021003



Mengetahui:
Ketua Jurusan/Prodi

Dr. H. Supardin, M.H.I
NIP.196503021994031003

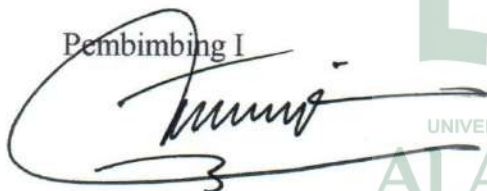
PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal skripsi yang berjudul, “Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm)”, yang disusun oleh Yuliyanti, NIM: 10100114100, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam seminar proposal skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 M bertepatan pada tanggal 27 Sya’ban 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan penelitian (dengan berbagai perbaikan).

Demikian pengesahan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

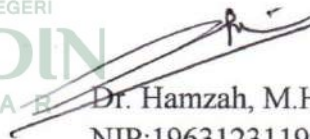
Makassar, 31 Mei 2017 M
5 Ramadhan 1438 H

Pembimbing I



Dr. H. Supardin, M.H.I.
NIP: 196503021994031003

Pembimbing II



Dr. Hamzah, M.H.I.
NIP: 196312311993021003

Disahkan oleh:
Ketua Jurusan Peradilan



Dr. H. Supardin, M.H.I.
NIP: 196503021994031003

PERSETUJUAN PEMBIMBING/PENGUJI

Skripsi yang berjudul, “Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Bima Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm)”, yang disusun oleh Yuliyanti, NIM: 10100114100, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang seminar hasil yang diselenggarakan pada hari Selasa 19 Desember 2017 M, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 H, dinyatakan telah diperiksa secara saksama, diteliti, dan disetujui untuk *dimunāqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 19 Maret 2018
2 Rajab 1439 H

Penguji I : Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag
Penguji II : Dr. Abdillah Mustari, M.Ag
Pembimbing I : Dr. H. Supardin, M.H.I
Pembimbing II : Dr. Hamzah Hasan, M.H.I

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Disetujui oleh:
Ketua Jurusan/Prodi



Dr. H. Supardin, M.H.I.
NIP. 19650321994031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Kampus I Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II Jl. HM. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 424835 Fax. 424836

Nomor : SI.1/PP.00.9/37/2017

Samata, 19 September 2017

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Kepada Yth

Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
Cq. Kepala UPT P2T BKPM Prov. Sul-Sel.

Di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama	: Yuliyanti
Nim	: 10100114100
Fakultas/jurusan	: Syari'ah dan Hukum /Peradilan
Semester	: VII (Tujuh)
Alamat	: Samata-Gowa

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

"Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm)"

Dengan Dosen Pembimbing : 1.Dr. H. Supardin, M.H.I.

2. Dr. Hamzah, M.H.I.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bima Kelas 1 B" terhitung mulai tanggal 26 September s/d 26 Oktober 2017.

Demikian harapan kami dan terima kasih.

Wassalam
An. Rektor
Dekan,



Prof. Dr. Darussalam., M.Ag

NIP. 19621016199031003

Tembusan :

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar Di Samata Gowa.



120171914214100

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 13929/S.01P/P2T/09/2017
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
Gubernur Nusa Tenggara Barat

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : SI.1/PP.00.9/320/2017 tanggal 19 September 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **YULIYANTI**
Nomor Pokok : 10100114100
Program Studi : Peradilan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN NO. 0476/PDT.G/2015/PA.BM) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **26 September s/d 26 Oktober 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 20 September 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN. SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Peringgal.

SIMAP PTSP 20-09-2017



Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://p2tbkpmdu.sulselprov.go.id> Email : p2t_provsulsel@yahoo.com
Makassar 90222





PEMERINTAH KABUPATEN BIMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Soekarno Hatta No. 167 Raba-Bima Tlp. (0374) 43043

Raba – Bima, 25 September 2017 M

Nomor : 070/147/IX/147/003/2017
Lampiran : --
Perihal : **Rekomendasi Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala BAPPEDA
Kabupaten Bima
di-

Raba

Berdasarkan Surat Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggaraan Perizinan, Nomor : 13929/S.01P/P2T/09/2017. Tanggal 20 September 2017. Perihal : Permohonan Ijin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : YULIYANTI
Nomor Pokok : 10100114100
Program Studi : Peradilan
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Sila Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima

Bermaksud akan mengadakan Penelitian Dengan Proposal Berjudul " **MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN NO. 0476/PDT.G/2015/PA.BM)** " Dari tanggal 25 September s.d 25 Oktober 2017 yang berlokasi di ~~SMP-02 Lambu, Kabupaten Bima~~ Pengadilan Agama Bima.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat memberikan Rekomendasi Kegiatan tersebut dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan Judul Penelitian yang dimaksud;
2. Harus Mentaati Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan Adat Istiadat setempat;
3. Apabila masa berlakunya Surat Rekomendasi tersebut sudah berakhir sedangkan pelaksanaan Penelitian belum selesai, perpanjangan harus diajukan kepada Instansi Pemberi Rekomendasi / Ijin;
4. Rekomendasi ini dicabut bila tidak mengindahkan Ketentuan-Ketentuan diatas;
5. Setelah selesai agar menyampaikan Laporan hasil Penelitian Kepada Bupati Bima, Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bima.

Demikian untuk maklum dan mendapat perhatian.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BIMA



TEMBUSAN : disampaikan kepada :
Yang bersangkutan di tempat.



PENGADILAN AGAMA BIMA

KELAS I-B

Jalan Gatot Subroto Raba-Bima Tlp. (0374) 43209 Fax. 45156
Website : www.pa-bima.go.id Email : bima_pa@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W22-A5/950BP.02/X/2017

Ketua Pengadilan Agama Bima menerangkan bahwa :

Nama : YULIYANTI
NIM : 10100114100
Program Studi : Fakultas Syari'ah dan Hukum / Peradilan
Alamat : Samata-Gowa

Telah mengadakan Penelitian sebagai salah satu syarat penyelesaian Skripsi dengan Judul:

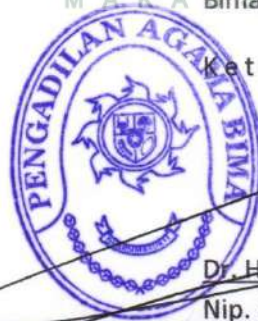
"MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN NO. 0476/PDT.G/2015/PA.BM)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

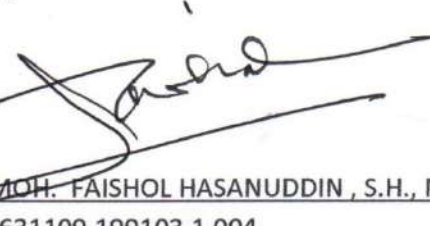
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A M Bima, 12 Oktober 2017



Ketua,


Dr. H. MOH. FAISHOL HASANUDDIN, S.H., M.H.
Nip. 19631109.199103.1.004

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : *Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I*
Jabatan : *Hakim Pratama Muda*
Alamat : *BTN Gindi Asri Jatiwangi Asakota Kota Bima*

Telah menjadi narasumber dalam penelitian skripsi dengan judul "Mediasi dalam penyelesaian sengketa waris perspektif hukum Islam (Studi Putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm).

Dengan Saudari:

Nama : Yuliyanti
NIM : 10100114100
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Peradilan
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Bima, 4 Oktober 2017

Narasumber

[Signature]
M. ISNA WAHYUDI, S.H.I, M.S.I

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DR. H. MOLT. FAISHOL HASANUDDIN, SH. MH.
Jabatan : KETUA PA BIMA
Alamat : Jl BATUT SUBROTO, NO 10. BIMA.

Telah menjadi narasumber dalam penelitian skripsi dengan judul "Mediasi dalam penyelesaian sengketa waris perspektif hukum Islam (Studi Putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm).

Dengan Saudari:

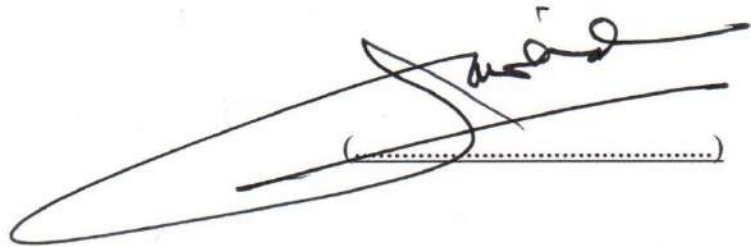
Nama : Yuliyanti
NIM : 10100114100
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Peradilan
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Bima, 3 Oktober 2017

Narasumber



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DRG. H. MUHAMMIDIN. MH.
Jabatan : WAKIL KETUA. P.A BIMA
Alamat : Jln Kesra Raya No 160 Prumnas Ampenan

Telah menjadi narasumber dalam penelitian skripsi dengan judul "Mediasi dalam penyelesaian sengketa waris perspektif hukum Islam (Studi Putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm).

Dengan Saudari:

Nama : Yuliyanti
NIM : 10100114100
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Peradilan
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Bima, 12 Oktober 2017

Narasumber

DRG. H. MUHAMMIDIN. MH.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mulyadi, S. Ag
Jabatan : Hakim
Alamat : Lingk. Sadia I. Kel. Sadia Kec. Mpunda Kota Bima

Telah menjadi narasumber dalam penelitian skripsi dengan judul "Mediasi dalam penyelesaian sengketa waris perspektif hukum Islam (Studi Putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm).

Dengan Saudari:

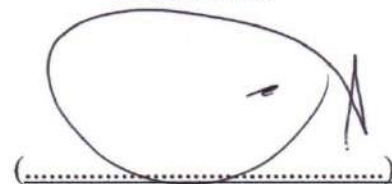
Nama : Yuliyanti
NIM : 10100114100
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Peradilan
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Bima, 4 Oktober 2017

Narasumber





PENGADILAN AGAMA BIMA P U T U S A N

Perkara : Gugatan Warist
Nomor : 0476/Pdt.G/2015/PA.BM.
Tanggal : 18 Mei 2015



Nurlaela binti H. M. Jafar Abdullah, Dkk.
(Penggugat)

Melawan

H. Tajudin bin H. M. Jafar Abdullah, Dkk.
(Tergugat)

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin, tanggal 18 Mei 2015 bertempat di ruang Mediasi Pengadilan Agama Bima, Kami para pihak dalam perkara, Nomor 0476/Pdt.G/2015/PA.BM antara:

- A. 1. Nurlaelah binti H. M. Jafar Abdullah, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Kartini no.8 Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae, Barat Kota Bima, dalam hal ini disebut sebagai Penggugat I;
2. Hj. Hajnah binti H.M. Jafar Abdullah, Pekerjaan -, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Panji Tilar, gang Cilinaya Indah no.8 A, Kekalik Jaya, Sekarbela, Kota Mataram, dalam hal ini disebut sebagai Penggugat II;
3. Tangaya binti H.M.Jafar Abdullah, Pekerjaan - , agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Kartini no.8 Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, dalam hal ini disebut sebagai Penggugat III;
4. Syahbudin bin H.M.Taher Abdullah, Pekerjaan PNS, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Gunung Merapi gang Kardeka III, RT.040, RW.02 Lingkungan Pelita, Dasan Agung Baru, Kota Mataram, dalam ini disebut sebagai Penggugat IV;
5. Muh. Rum Saleh, SH, pekerjaan Advokat, agama Islam, berkantor di Jl. Mawar utara/Tolobali Rt.015, RW.06, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, dalam hal ini disebut sebagai Penggugat V;

Melawan

- B. 1. H. Tajudin bin H. M. Jafar Abdullah, pekerjaan Pensiunan PNS, agama

I. Tanah Wasah So'o Penatoi Kel. Penatoi Sebelah Selatan Jln. Gajah Mada Seluas 64 are

No	Nama Penerima	Uraian	Lokasi
1.	Rusna Binti H. M Jafar	Tanah sawah	So'o Penatoi Kel. Penatoi Jln. Gajah Mada SDA SDA
2	Syahbudin Bin H. M. Jafar M. Rum Saleh, SH	Tanah sawah	
3		Tanah sawah dikurangi dari luas tanah untuk Jasa Kuasa Hukum 6,4 are	

II. Tanah Sawah So' o Tolo Tando Kel. Matakando seluas 2,7 Ha

No	Nama Penerima	Uraian	Lokasi
1.	Syahbudi Bin H. M. Jafar	Tanah sawah	Tanah So' o Tolo Tando Kel. Matakando SDA SDA SDA SDA SDA
2	Rusnah Binti H. M Jafar	Tanah sawah	
3	Nurlailah Binti H. M Jafar	Tanah sawah	
4	Hj. Hajnah Binti H. M Jafar	Tanah sawah	
5	H. Tajudin Bin H. M. Jafar	Tanah sawah	
6	M. Rum Saleh, SH	Tanah sawah dikurangi dari luas tanah untuk Jasa Kuasa Hukum 27 are	

III. Tanah So'o Penatoi Sebelah Timur jln. Gatot Subroto Seluas 21 Ha

No	Nama Penerima	Uraian	Lokasi
1.	H. Tajudin Bin H. M. Jafar	Tanah sawah	Tanah So' o Penatoi sebelah Timur jln. Gatot Subroto Kel. Penatoi SDA SDA
2	Nurlailah Binti H. M. Jafar M. Rum Saleh, SH	Tanah sawah	
3		Tanah sawah dikurangi dari luas tanah untuk Jasa Kuasa Hukum 21 are	

IV. Tanah Sawah So'o Santi Sebelah kel. Santi, Sebelah Barat Jln. Gatot Subroto Seluas ± 70 are

No	Nama Penerima	Uraian	Lokasi
1.	Para ahli waris	Tanah tersebut diatas untuk dijual bersama oleh para ahli waris yang, kurangi dari jasa kuasa hukum 7 are	Tanah So' o Santi kel. Santi, sebelah barat jln. Gatot Subroto Kel. Penatoi SDA
2	M. Rum Saleh, SH	Tanah sawah dikurangi dari luas tanah untuk Jasa Kuasa Hukum 7 are	

V. Tanah Kebun So'o Jenamawa / Oi Niu Kel. Dara seluas ± 1,4 Ha

No	Nama Penerima	Uraian	Lokasi
1.	Para ahli waris	Tahan kebun tersebut diatas untuk dijual bersama oleh para ahli waris setelah di kurangi jasa kuasa hukum 14 are	Tanah kebun So' o Jenama / Oi Niu Kel. Dara
2	M. Rum Saleh, SH	Tanah kebun tersebut dikurangi untuk jasa kuasa hukum 14 are	SDA

VI. Tanah Sawah So'o Nonu desa Belo Kec. Palibelo

No	Nama Penerima	Uraian	Lokasi
1.	Drs. Abdul Hafid M. Saleh	Untuk jasa penanganan Perkara ± 20 Tahun Perkara H. M. Jafar M. Abdulah	Tanah sawah So'o Nonu Desa Belo Kec. Palibelo

Pasal 3

Bahwa dengan terjadinya penyelesaian secara musyawarah mufakat atas harta warisan ini, maka antara pihak Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi permasalahan mengenai harta-harta tersebut di atas.

Pasal 4

Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam akta perdamaian yang dituangkan dalam putusan.

Selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor:0476/Pdt.G/2015 /PA.BM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perdamaian persetujuan tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA No 01 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas.
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 401.000,- (Empat ratus satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

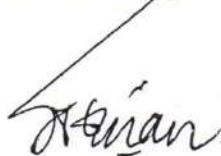
Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 M. bertepatan dengan 29 Radjab 1436 H. Oleh Mulyadi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Ijmak, SH.,M.H. dan Drs. M. Agus Sofwan Hadi, masing-masing sebagai hakim-hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh St. Ramlah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat I;

Hakim Anggota,



Drs. H. Ijmak, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,



Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Ketua Majelis,



Mulyadi, S.Ag.

Panitera Pengganti,



St. Ramlah

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp	60.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp	300.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah		: Rp	401.000,-





LAPORAN TAHUNAN : 2015
PENGADILAN AGAMA BIMA
TENTANG PERKARA YANG DITERIMA

B.8

NO	BULAN/JENIS PERKARA	izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perk. Oleh PPN	Keterangan Perkawinan	Keputusan Alas Kew. Smitis	Ceraai Talak	Ceraai Gugat	Harta Bersama	Pengangkatan anak	Nafkah anak oleh ibu	Hak-hak bekas istri	Pengesahan anak	Pencabutan Kek. Wali	Penunjukan org. lain sebag wali	Ganti rugi thd. Wali	Asal usul anak	Pencabutan kawin campur	Isbat Nikah	izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali adhol	Kewarsan	Wasiat	Hibah	Wakaf	LAIN-LAIN	JUMLAH	KETERANGAN			
1	JANUARI	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	JANUARI						42	130	3	2									6	3	1								1	188		
2	FEBRUARI						28	103	1	2									4	1	1					1				143		
3	MARET						32	79	1	1									4	3									1	121		
4	APRIL						26	67											90										1	121		
5	MEI						25	103	1	1								80											1	196		
6	JUNI						33	100	1										6	2									1	216		
7	JULI						22	76											6	1									1	144		
8	AGUSTUS						30	116	1									6												105		
9	SEPTEMBER						47	119	1										13	4									1	156		
10	OKTOBER						41	121	1										61										2	187		
11	NOVEMBER						44	126	3										17										1	231		
12	DESEMBER						16	68											8	1									1	194		
	JUMLAH	0					386	1208	13	6		2						303	6	25	3	10		1				10	0	1967		

Keterangan:

*) Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan

Mengetahui
Kelua,

Bima, 31 Desember 2015
Panitera,

Gugatan Permohonan
386 6
1208 2

Drs. Akhmad Abdul Hadi, SH., MH.
NIP. 19860822 11/0203 1 003

Drs. H. Muhtar
NIP. 19670302 1003/3 1005

1617 350 1967

LAPORAN TAHUNAN : 2015
PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS I-B
TENTANG PERKARA YANG D PUTUS



BULAN / JENIS PERKARA	Sisa Tahun lalu	Perkara yg. Diterima	JUMLAH	DICABUT	Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perk. Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelahiran Atas Kewf. Sm/s	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Pengangkatan anak	Naikah anak oleh Ibu	Max-nak bekas ism	Pengesahan anak	Pencabutan Kek. Wali	Penunjukkan org. lain sebag wali	Ganti rugi thd. Wali	Asal usul anak	Penolakan kawin campur	Isbat Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali adhol	Kewarisan	Waslat	Hibah	Wakaf	Shodaqah	(P3HP)	LAJIN-LAIN	Ditolak	Gugur	JUMLAH	SISA AKHIR	KETERANGAN
1 JANUARI	279	188	467	19						30	89			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
2 FEBRUARI	312	143	455	25						19	86	2	3	6	2	1	2																				
3 MARET	308	121	429	23	1					36	88	2	1	6	3																						
4 APRIL	289	186	475	11						30	88			83	2	1	1																				
5 MEI	280	216	496	13						17	77	1	1	7																							
6 JUNI	378	144	522	23						23	92	4		78	4	1																					
7 JULI	287	105	402	14						14	58			5																							
8 AGUSTUS	311	156	467	15						30	85			8																							
9 SEPTEMBER	316	187	503	23						40	86			9																							
10 OKTOBER	329	231	560	24						32	100			60																							
11 NOVEMBER	339	194	533	31						23	94			8																							
12 DESEMBER	374	96	470	33						32	115			23																							
JUMLAH	3812	1967	5778	214	1					326	1043	8	5	293																							

Keterangan:

*) Permohonan Perlindungan

Pembagian Harta Peninggalan

Mengetahui
Ketua,Bima, 31 Desember 2015
Panitera,Drs. Akhmad Abdul Hadi, SH., MH
NIP. 19660822 199203 1 003Drs. H. Muhtar
NIP. 19670202 199303 1 005

Bima, 30 Desember 2016
Panitera,

Drs. H. Muhtar
NIP. 19670302 199303 1005

Drs. Muhamad Camuda, MH.
NIP.196708101994031011

NO	BULAN/JENIS PERKARA	izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	PPN	Pembatalan Perkawinan	Ketatalan Atas rewj.	CeraI Talak	CeraI Gugat	Harta Bersama	Pengangkatan anak	Naikah anak oleh Ibu	Tak-hak bekas Istri	Pengesahan anak	Pencatatan Kek. Wali	Penunjukkan org. lain sebag wali	Ganti rugi thd. Wali	Asal usul anak	Penolakan kawin campur	Isbat Nikah	izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali adhol	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Shodagah	P3HP*)	LAIN-LAIN	JUMLAH	KETERANGAN	
1	JANUARI	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
1	JANUARI						56	127		2					1				11		4	1					5		207			
2	FEBRUARI						35	92											7		6	1							141			
3	MARET						28	101	2	1			2						11		4	1	2			1		1	154			
4	APRIL						44	82				1							20		7	1							155			
5	MEI	1					49	109	1			1							10		4					1		1	176			
6	JUNI						29	94	1										9		2								135			
7	JULI						36	125	1										14		1	1							178			
8	AGUSTUS						49	145	1	1			3						15		1	2				1		1	228			
9	SEPTEMBER						42	126					1		1				17		5	1	2						195			
10	OKTOBER	1					41	140	1			3							66		5	1					1	1	259			
11	NOVEMBER						38	148	1										15		10	1	1				1	2	217			
12	DESEMBER						18	53	4						1				6		8	1	2						94			
	JUMLAH	2					465	1342	12	4		11			3			201		67	8	10					10		3	2139		

Keterangan:
*) Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan

**Mengetahui
Ketua,**



**LAPORAN TAHUNAN : 2016
PENGADILAN AGAMA BIMA
TENTANG PERKARA YANG DITERIMA**

Keterangan:
*) Permohonan Pertolongan Pembagian
Harta Peninggalan

**Mengetahui
Ketua,**

Bima, 30 Desember 2016
Panitera,

Drs. Muhamad Camuda, IMH.
NIP.196708101994031011

Drs. H. Muhtar
NIP. : 9670302 199303 1005



B.8

LAPORAN TAHUNAN : 2017
PENGADILAN AGAMA BIMA
TENTANG PERKARA YANG DITERIMA

NO	BULAN/JENIS PERKARA	Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perk. Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelahiran Atas Kewj. Sm/s	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Pengangkatan anak	Pengesahan anak	Pembatalan Ket. Wali	Penunjukkan org. lain sebg wali	Ganti rugi thd. Wali	Asal usul anak	Penolakan kawin campuran	Isbat Nikah	Izin Kawin	Dispersasi Kawin	Wali adhol	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Shodaqah	P3HP*)	LAIN-LAIN	JUMLAH	KETERANGAN			
1	JANUARI	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	JANUARI						34	125	1									17	4		2					1				185		
2	FEBRUARI						22	101									5				1					1	1			138		
3	MARET						32	112	3								10	4												162		
4	APRIL						26	85									7	8			1									128		
5	MEI						32	131	3				5			2			8		1									183		
6	JUNI						15	56					1				7													80		
7	JULI						45	147	2								12				1									216		
8	AGUSTUS		1				47	144	2								15				2									224		
9	SEPTEMBER						35	131	3								14				2									196		
10	OKTOBER																													0		
11	NOVEMBER																													0		
12	DESEMBER																													0		
	JUMLAH																													1512		

Keterangan:

*) Permohonan Pertolongan Pembagian
Harta PeninggalanMengetahui
Ketua,Bima, 30 Desember 2017
Panittra,DR. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H.,M.H
NIP. 1963.1109.199103.1.004Drs. H. Musaddad, S.H.
NIP. 19610812.198803.1.006

NIP. 1961C812.198803.1 006

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 01 TAHUN 2008

**Tentang
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**



**MAHKAMAH AGUNG RI
2008**



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 01 TAHUN 2008

Tentang

**PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.
 - b. Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).
 - c. Bahwa hukum acara yang berlaku, baik pasal 130 HIR maupun pasal 154 RBg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri.
 - d. Bahwa sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam

mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata, dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Mahkamah Agung.

- e. Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2003, ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari peraturan mahkamah agung tersebut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003 perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan.

Mengingat :

1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) *Staatsblad* 1941 Nomor 44 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) *Staatblad* 1927 Nomor 227;
3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 8 tahun 2004;
4. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, lembaran Negara Nomor 73 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, lembaran Negara Nomor 9 Tahun 2004 dan tambahan lembaran Negara No. 4359 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, lembaran Negara Nomor 20 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Nomor 34 Tahun 2004;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program

Pembangunan Nasional, Lembaran Negara Nomor 206 Tahun 2000.

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, Lembaran Negara Nomor 73 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611.

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

TENTANG
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini dimaksud dengan:

1. Perma adalah Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.
3. Hakim adalah hakim tunggal atau majelis hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengadili perkara perdata;
4. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya;
5. Kesepakatan perdamaian adalah dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian dengan bantuan seorang mediator atau lebih berdasarkan Peraturan ini;
6. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa

tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian;

7. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator;
8. Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian;
9. Prosedur mediasi adalah tahapan proses mediasi sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
10. Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh tiap pihak yang memuat duduk perkara dan atau usulan penyelesaian sengketa;
11. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah di akreditasi oleh Mahkamah Agung;
12. Proses mediasi tertutup adalah bahwa pertemuan-pertemuan mediasi hanya dihadiri para pihak atau kuasa hukum mereka dan mediator atau pihak lain yang diizinkan oleh para pihak serta dinamika yang terjadi dalam pertemuan tidak boleh disampaikan kepada publik terkecuali atas izin para pihak.
13. Pengadilan adalah Pengadilan Tingkat Pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
14. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tinggi dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Pasal 2

Ruang Lingkup dan Kekuatan Berlaku Perma

- (1) Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses perkara di Pengadilan.
- (2) Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini.
- (3) Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (4) Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.

- b. memiliki instruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi dan pendidikan atau pelatihan sebagai instruktur untuk pendidikan atau pelatihan mediasi;
- c. sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi bukan untuk mediator bersertifikat di pengadilan;
- d. memiliki kurikulum pendidikan atau pelatihan mediasi di pengadilan yang disahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pasal 6 **Sifat Proses Mediasi**

Proses mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.

BAB II **TAHAP PRA MEDIASI**

Pasal 7 **Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara dan Kuasa Hukum**

- (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
- (2) Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.
- (3) Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak mendorong para pihak, untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- (4) Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi
- (5) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.
- (6) Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam Perma ini kepada para pihak yang bersengketa.

Pasal 8 **Hak Para Pihak Memilih Mediator**

- (1) Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut:
 - a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan;
 - b. Advokat atau akademisi hukum;

Pasal 11
Batas Waktu Pemilihan Mediator

- (1) Setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim.
- (2) Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada ketua majelis hakim.
- (3) Ketua majelis hakim segera memberitahu mediator terpilih untuk melaksanakan tugas.
- (4) Jika setelah jangka waktu maksimal sebagaimana dimaksud ayat (1) terpenuhi, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua majelis hakim.
- (5) Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan memilih mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.
- (6) Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka Hakim Pemeriksa Pokok Perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim wajib menjalankan fungsi mediator.

Pasal 12
Menempuh Mediasi Dengan Iktikad Baik

- (1) Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan iktikad baik.
- (2) Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan iktikad tidak baik.

BAB III
TAHAP-TAHAP PROSES MEDIASI

Pasal 13
Penyerahan Resume Perkara dan Lama Waktu Proses Mediasi

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk

mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.

- (2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.
- (3) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan (6).
- (4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.
- (5) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
- (6) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

Pasal 14

Kewenangan Mediator Menyatakan Mediasi Gagal

- (1) Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.
- (2) Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.

Pasal 15

Tugas-Tugas Mediator

- (1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.

- (2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- (3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
- (4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Pasal 16 **Keterlibatan Ahli**

- (1) Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak.
- (2) Para pihak harus lebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau penilaian seorang ahli.
- (3) Semua biaya untuk kepentingan seorang ahli atau lebih dalam proses mediasi ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.

Pasal 17 **Mencapai Kesepakatan**

- (1) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
- (2) Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- (3) Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik.
- (4) Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.
- (5) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

- (6) Jika para pihak tidak mengkehendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

Pasal 18 **Tidak Mencapai Kesepakatan**

- (1) Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam pasal 14, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim.
- (2) Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
- (3) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.
- (4) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada pihak hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan.

Pasal 19 **Keterpisahan Mediasi dan Litigasi**

- (1) Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain.
- (2) Catatan mediator wajib dimusnahkan.
- (3) Mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.
- (4) Mediator tidak dapat dikenai pertanggung jawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.

BAB IV

TEMPAT PENYELENGGARAAN MEDIASI

Pasal 20

- (1) Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak.
- (2) Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan.
- (3) Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama tidak dikenakan biaya.
- (4) Jika para pihak memilih penyelenggaraan mediasi di tempat lain, pembiayaan dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.

BAB V

PERDAMAIAN DI TINGKAT BANDING, KASASI, DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 21

- (1) Para pihak, atas dasar kesepakatan mereka, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus.
- (2) Kesepakatan para pihak untuk menempuh perdamaian wajib disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili.
- (3) Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang berwenang atau Ketua Mahkamah Agung tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian.
- (4) Jika perkara yang bersangkutan sedang diperiksa di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali majelis hakim pemeriksa ditingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima pemberitahuan tentang kehendak para pihak menempuh perdamaian.
- (5) Jika berkas atau memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali belum dikirimkan, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib

menunda pengiriman berkas atau memori banding, kasasi dan peninjauan kembali untuk memberi kesempatan para pihak mengupayakan perdamaian.

Pasal 22

- (1) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penyampaian kehendak tertulis para pihak diterima Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.
- (2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dilaksanakan di pengadilan yang mengadili perkara tersebut ditingkat pertama atau di tempat lain atas persetujuan para pihak.
- (3) Jika para pihak menghendaki mediator, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan menunjuk seorang hakim atau lebih untuk menjadi mediator.
- (4) Mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tidak boleh berasal dari majelis hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan pada Pengadilan Tingkat Pertama, terkecuali tidak ada hakim lain pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.
- (5) Para pihak melalui Pengadilan Tingkat Pertama dapat mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada majelis hakim tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.
- (6) Akta perdamaian ditandatangani oleh majelis hakim banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak di catat dalam register induk perkara.
- (7) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) peraturan ini, jika para pihak mencapai kesepakatan perdamaian yang telah diteliti oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Pertama dan para pihak menginginkan perdamaian tersebut dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, berkas dan kesepakatan perdamaian tersebut dikirimkan ke pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung.

BAB VI KESEPAKATAN DI LUAR PENGADILAN

Pasal 23

- (1) Para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.
- (3) Hakim dihadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. sesuai kehendak para pihak;
 - b. tidak bertentangan dengan hukum;
 - c. tidak merugikan pihak ketiga;
 - d. dapat dieksekusi.
 - e. dengan iktikad baik.

BAB VII PEDOMAN PERILAKU MEDIATOR DAN INSENTIF

Pasal 24

- (1) Tiap mediator dalam menjalankan fungsinya wajib menaati pedoman perilaku mediator
- (2) Mahkamah Agung menetapkan pedoman perilaku mediator.

Pasal 25

- (1) Mahkamah Agung menyediakan sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator.

- (2) Mahkamah Agung menerbitkan peraturan mahkamah agung tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang menjalankan fungsi mediator.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya peraturan ini, peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 31 Juli 2008



KEPUK MAHKAMAH AGUNG

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

AUDDIN

AKASSAR

BAGIR MANAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti Skripsi yang berjudul **“MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA BIMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Putusan No. 0476/PDT.G/2015/PA.BM)”** bernama lengkap Yuliyanti, NIM: 10100114100, anak kedua dari tiga bersaudara dari

Almarhum H.M.Nor Ibrahim dan Hj. Hadijah. Lahir pada tanggal 25 Juli 1996, di Sonco Kec. Bolo Kab. Bima NTB. Peneliti mengawali jenjang pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Sanolo Kec. Bolo Kab. Bima pada tahun 2003-2008. Setelah itu peneliti melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Bolo Kab. Bima dari tahun 2008-2011. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Bolo Kab. Bima tahun 2011-2014. Dan pada tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan diperguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan lulus di Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan pada Jurusan Peradilan. Selama menyandang status mahasiswa di jurusan Peradilan Fakultas Syariah dan Hukum, adapun organisasi yang pernah diikuti yaitu Ikatan Penggiat Peradilan Semu (IPPS) Fakultas Syari’ah dan Hukum, sebagai kader PMII Cabang Gowa, Pengurus HMJ Peradilan periode 2016, dan Pengurus HMJ Peradilan periode.